

**PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**
(Suatu Studi di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember-Jawa Timur)

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh ;

Arief Widyanto

94-2028

Pembimbing

DR. HARRY YUSWADI, MA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2001

Asal		Klass
Terima	08 NOV 2001	307.76
No. Induk	10237000	WID

S

Lembar Pengesahan

Diterima oleh dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi, guna Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata I (SI) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 12
Bulan : Juli
Tahun : 2001

Panitia Penguji

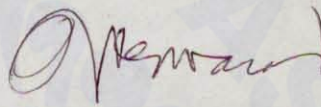
Ketua



Drs. Sulomo; SU
NIP. 130 879 635

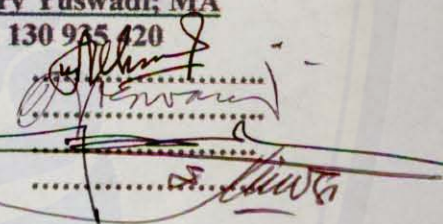
1. Drs. Sulomo; SU
2. DR. Harry Yuswadi; MA
3. Drs. Purwowibowo
4. Drs. Elly Suhartini; Msi

Sekretaris



DR. Harry Yuswadi; MA
NIP. 130 935 420

- (Ketua)
(Sekretaris)
(Anggota)
(Anggota)



mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan



Drs. H. Moh. Toerki
NIP. 130 524 832

HALAMAN MOTTO

“ Dan Janganlah Kamu Membuat Kerusakan Dimuka Bumi, Sesungguhnya (Allah) Memperbaikinya dan Berdo'alah KepadaNya dengan Rasa Takut (Tidak akan diterima) dan Harapan (Akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah Amat Dekat Kepada Orang-orang yang Berbuat Baik”.

(Terjemahan Q.S. Al A'raaf 56)

“ Tidakkah Engkau Perhatikan Sesungguhnya Allah Telah Menundukkan Untuk (kepentingan) Apa yang Di langit dan Apa yang Di Bumi dan Menyempurnakan Untukmu Ni'mat-Nya Lahir dan Batin. Dan Diantara Manusia ada yang Membantah tentang (Keesaan) Allah tanpa Ilmu Pengetahuan atau Petunjuk dan Tanpa Kitab yang Memberi Penerangan”.

(Terjemahan Q.S. Luqman 20)

Sumber: Tafsir Al Qur'an Karim (Penerbit PT. Hadikarya:1989)

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk :

- * **Ibunda tercinta Ny. Hariwati dan almarhum ayahanda tersayang Arief Koeswondo yang begitu besar kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap keluarga.**
- * **Eyangku Tersayang R. Roekanti Koesdi, Keponakannku Ceicilya S yang selalu menjadi penghiburku**
- * **Anis Kurniawati tercinta dan tersayang.**
- * **Bapak Hadi Prayitno beserta ibu atas segenap dorongannya.**
- * **Adik-adikku terkasih Arif Budi Cahyono serta si bungsu Arif Sunaryoko Hadi atas segala motivasi, keikhlasan serta pengorbanannya**
- * **Saudara-saudaraku Mia Arisanti Peni, Tami', Iin , Uli, Mas Derry, Dik Neny, Arik, dan Eva atas seluruh dukungan dan nasehatnya**
- * **Sahabat-sahabatku terhormat Prana, Ali, Mono, Oki', Legowo, Pay, Didu' Jaelaboud, Ji On, Om Monang, Eri', Paidy,Wayan, Derry, Andrey, Cholis, Silvy, Mba' Ercy, Rini, Risca, Ana-Ani, Dik Nani' atas semua kesempatan, kepercayaan, bantuan serta semua kenangan indahny baik suka maupun duka.**
- * **Almamaterku Tercinta**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Sekalian Alam, karena hanya atas rahmat dan innayah-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi berjudul **PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN** ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan materiil maupun moril dari berbagai pihak baik keluarga, sahabat-sahabat, pembimbing, serta instansi-instansi terkait, sehingga pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Harry Yuswadi; MS, selaku dosen pembimbing.
2. Bapak Drs. Husni A. Ghani; Msi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, atas nasehat dan arahannya selama pengerjakan penulisan skripsi ini.
3. Bapak. Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Hadi Prayitno; Msi, sebagai dosen wali yang selalu mendorong tanpa kata henti.
5. Bapak Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
6. Rekan-rekan keluarga besar Jawa II/17A:
7. Rekan-rekan Ilmu Kesejahteraan Sosial'94 atas semua kebersamaannya selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, demikian pula kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa penyusun harapkan untuk kesempurnaan karya tulis ini.

Jember; November 2000

(Penyusun)

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk :

- * **Ibunda tercinta Ny. Hariwati dan almarhum ayahanda tersayang Arief Koeswondo yang begitu besar kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap keluarga.**
- * **Eyangku Tersayang R. Roekanti Koesdi, Keponakannku Ceicilya S yang selalu menjadi penghiburku**
- * **Anis Kurniawati tercinta dan tersayang.**
- * **Bapak Hadi Prayitno beserta ibu atas segenap dorongannya.**
- * **Adik-adikku terkasih Arif Budi Cahyono serta si bungsu Arif Sunaryoko Hadi atas segala motivasi, keikhlasan serta pengorbanannya**
- * **Saudara-saudaraku Mia Arisanti Peni, Tami', Iin , Uli, Mas Derry, Dik Neny, Arik, dan Eva atas seluruh dukungan dan nasehatnya**
- * **Sahabat-sahabatku terhormat Prana, Ali, Mono, Oki', Legowo, Pay, Didu' Jaelaboud, Ji On, Om Monang, Eri', Paidy,Wayan, Derry, Andrey, Cholis, Silvy, Mba' Ercy, Rini, Risca, Ana-Ani, Dik Nani' atas semua kesempatan, kepercayaan, bantuan serta semua kenangan indahny baik suka maupun duka.**
- * **Almamaterku Tercinta**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	(i)
HALAMAN PENGESAHAN	(ii)
HALAMAN MOTTO	(iii)
HALAMAN PERSEMBAHAN	(iv)
KATA PENGANTAR	(v)
DAFTAR ISI	(vi)
DAFTAR TABEL	(viii)
DAFTAR LAMPIRAN	(x)
BAB I.	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Pokok Permasalahan	3
	1.3 Pokok Bahasan	4
	1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
	1.5 Konsepsi Dasar	12
	1.6 Definisi Operasional	21
	1.7 Metode Penelitian	26
BAB II.	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ..	30
	2.1 Lokasi Penelitian	30
	2.2 Penduduk	38
	2.3 Latar Belakang Sosial Budaya	46
BAB III	KARAKTERISTIK RESPONDEN	49
	3.1 Alamat Responden	49
	3.2 Umur Responden	50
	3.3 Tingkat Pendidikan Responden	50
	3.4 Status Perkawinan	51
	3.5 Tingkat Pendapatan Responden	57
BAB IV	PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN SOLIDARITAS SOSIAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN	59
	4.1 Penyertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	59
	4.2 Dorongan Tokoh Masyarakat terhadap Masyarakat untuk ikut serta	62
	4.3 Evaluasi akan Hasil Pembangunan	65
	4.4 Pemanfaatan Hasil Pembangunan	67

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	71
	5.1Kesimpulan	71
	5.2 Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Fasilitas Ibadah Kelurahan Jember Lor	34
2. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kelurahan Jember Lor	34
3. Jumlah Fasilitas Olah Raga Kelurahan Jember Lor	35
4. Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kelurahan Jember Lor	36
5. Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin	38
6. Jumlah Kelahiran di Kelurahan Jember Lor	39
7. Jumlah Pendatang di Kelurahan Jember Lor	39
8. Jumlah Kematian di Kelurahan Jember Lor	40
9. Jumlah Penduduk yang Pergi di Kelurahan Jember Lor	40
10. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Jember Lor	41
11. Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan	42
12. Jumlah Penduduk menurut Agama	48
13. Alamat Responden	49
14. Komposisi Umur Tokoh Masyarakat	50
15. Komposisi Pendidikan Responden	51
16. Komposisi Status Perkawinan Responden	51
17. Komposisi Jumlah Anak yang menjadi tanggung jawab Responden ...	52
18. Komposisi ada tidaknya Anggota Keluarga lain	53
19. Komposisi Anggota Keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah	53
20. Komposisi ada tidaknya anggota keluarga lain yang tidak mempunyai hubungan darah	54
21. Komposisi Alasan Kepala Keluarga bekerja diluar rumah	55
22. Komposisi Jenis Pekerjaan Responden	56
23. Komposisi jarak tempat kerja dengan tempat tinggal	57
24. Komposisi lama bekerja responden	58
25. Komposisi Pendapatan Keluarga	58

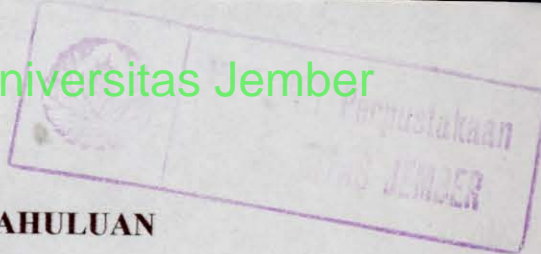
Digital Repository Universitas Jember

26. Penyertaan Tokoh Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	60
27. Keikutsertaan Tokoh Masyarakat dalam Proses Pembangunan	63
28. Evaluasi Hasil Pembangunan	65
29. Pemanfaatan Hasil Pembangunan	67
30. Realisasi Program Pembangunan	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran:
1. Surat Ijin Penelitian FISIP; Univ. Jember
 2. Surat Ijin Penelitian LPM; Univ. Jember
 3. Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Daerah Tingkat II Jember
 4. Surat Ijin Penelitian dari Kecamatan Patrang
 5. Struktur Organisasi Kelurahan Jember Lor
 6. Peta Desa Kelurahan Jember Lor
 7. Daftar Quisoner
 8. Rekapitulasi Alamat Responden
 9. Rekapitulasi Daftar Hadir Perencanaan Pembangunan
 10. Rekapitulasi Daftar Hadir Pelaksanaan Pembangunan
 11. Rekapitulasi Daftar Hadir Evaluasi Pembangunan
 12. Rekapitulasi Daftar Hadir Pemeliharaan Pembangunan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat kota menghadapi kenyataan buruk didalam pola-pola hubungan antar individu dan atau kelompok. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meluasnya sikap individualitas warga masyarakat; seakan membuat penyekat psikologis didalam melakukan hubungan antar mereka.

Kenyataan ini berakibat luas pada sistim kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Namun perlu kiranya dilihat struktur masyarakat kota sebagai faktor yang mendasar dimana gejala ini hidup dan berkembang serta mempengaruhi derajat integrasi masyarakat seperti dinyatakan oleh Soetarso(1982:91);

Struktur sosial masyarakat tidak dapat diragukan lagi pengaruhnya terhadap derajat Integrasi didalam masyarakat. Dengan mudah dapat dilihat perbedaan yang sangat menyolok antara suatu desa dengan kota industri; juga suatu masyarakat sedang berkembang dengan masyarakat yang sudah maju industrinya. Perbedaan struktur sosial tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perbedaan sikap dan tingkah laku yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam organisasi dan orientasi dari masyarakat-masyarakat ini. Perbedaan inipun tidak dapat terlepas dari adanya berbagai sistem nilai dan kepercayaan.

Kelas-kelas sosial dan tingkat heterogenitas yang tinggi didalam struktur sosial masyarakat kota, cenderung mengakibatkan kesenjangan sosial yang menajam. Kesenjangan sosial ini membawa pengaruh kepada timbulnya masalah-masalah sosial yang akan mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kompleksitas kehidupan masyarakat kota atau modern cenderung membawa masalah sosial yang kompleks pula. Masalah-masalah ini dirasakan oleh orang perorangan, kelompok maupun seluruh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak mengenakan keterlibatan warga masyarakat melalui berbagai sistem kegiatan, dirasakan perlu adanya untuk pemecahan masalah yang timbul. Anggapan ini sejalan dengan pendapat Cohen dalam bukunya Muhidin (1981:36) yaitu istilah masalah sosial seperti yang dimaksud disini ialah terbatas kepada masalah yang timbul dalam

keluarga, kelompok atau tingkah laku individual yang menuntut adanya campur tangan masyarakat yang teratur agar supaya masyarakat dapat meneruskan fungsinya.

Tidak mustahil, apabila masalah-masalah yang dialami oleh individu, keluarga atau kelompok-kelompok tertentu didalam masyarakat tidak tertangani atau terpecahkan, akan menimbulkan kekecewaan atau frustrasi. Keadaan ini dirangsang oleh perbedaan-perbedaan yang cukup menonjol diantara kelas-kelas sosial didalam masyarakat kota yang cenderung mempertajam kesenjangan diantara mereka. Kesenjangan ini dapat merangsang timbulnya tindak-tindak kejahatan yang akan mengancam keteraturan sosial.

Dalam upaya pemecahan masalah-masalah yang timbul didalam masyarakat maka usaha peningkatan dan pengembangan solidaritas sosial perlu dilaksanakan. Pada upaya ini, solidaritas sosial perlu dilaksanakan. Pada upaya ini, solidaritas sosial dapat menjembatani hubungan antar kelas-kelas sosial, yang direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Hal inipun sejalan dengan program pemerintah, yaitu misalnya dengan dibentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang disingkat LKMD di tiap-tiap wilayah pemerintahan desa atau kelurahan. LKMD.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah lewat LKMD ini baru mampu membuka jalan bagi pemecahan masalah-masalah kesejahteraan sosial di wilayah desa atau kelurahan. Kenyataan membuktikan bahwa lembaga ini banyak menemui hambatan dalam menangkap gejala-gejala perubahan masyarakat yang terus berlangsung. Demikian pula kebutuhan bagi pemecahan masalahnyapun akan berubah. Cara-cara konvensional yang dilakukan yang dilakukan dalam pemecahan masalah menjadi semakin tidak sesuai. Seperti pola gotong-royong yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan yang selalu dipaksakan penerapannya di masyarakat kota. Disini jelas menunjukkan bahwa bentuk solidaritas sosial yang dimiliki dan menjadi ciri masyarakat desa berbeda dengan bentuk solidaritas sosial yang dimiliki masyarakat kota.

Melihat fungsi dan tugas LKMD contohnya, maka secara operasional melibatkan setiap tokoh masyarakat dalam upaya-upaya pencapaian tujuannya. Karena, tokoh masyarakat dinilai strategis dan berpengaruh dalam menggerakkan partisipasi sosial masyarakat pada tujuan-tujuan perubahan berencana. Potensi yang dimiliki oleh tokoh masyarakat ini, apabila dimanfaatkan dengan baik lewat LKMD merupakan kekuatan yang cukup berarti. Demikian pula dengan perubahan kondisi sosial masyarakat menuntut partisipasi sosial tokoh masyarakat dalam berbagai sistem kegiatan. Sistem kegiatan ini dapat berupa pembangunan di lingkungannya.

Kedudukan tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun tokoh informal menjadi sentral dalam hal ini. Sebab, tokoh-tokoh masyarakat tersebut mewakili kelompok-kelompok sosial-ekonomi dan atau kepentingan-kepentingan tertentu yang melegitimasi mereka menjadi tokoh masyarakat.

Kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh warga masyarakat terhadap tokoh-tokohnya diharapkan membawa umpan balik yang positif baik kehidupan kemasyarakatan. Dalam hubungan ini, tokoh masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam meningkatkan dan membina solidaritas sosial warga masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan bertolak dari latar belakang tersebut penulis juga ingin mengetahui seberapa jauh partisipasi tokoh masyarakat dalam pembangunan lingkungannya. Oleh karena itu penulis menetapkan judul penelitian ini sebagai berikut : "Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Lingkungan di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember".

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam suatu penelitian pokok permasalahan merupakan hal yang perlu diperhatikan. sebab dengan adanya pokok permasalahan penelitian yang jelas dan tegas akan mempengaruhi dalam menentukan langkah-langkah dalam rangka pemecahan persoalan yang menjadi titik berat dalam penelitian.

Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu penelitian. Permasalahan dirumuskan, kemudian menjadi pedoman dalam pembahasan untuk mencari pemecahannya. Seperti yang dikemukakan oleh Loedin (1984: 16) ; bahwa permasalahan mempunyai arti yang jelas dan harus memenuhi syarat-syarat antara lain: “menunjukkan hubungan dua variabel, persoalan harus ditegaskan dalam bahasa yang jelas, untuk lebih mudahnya dituangkan dalam kalimat tanya dan persoalan harus memungkinkan pengukuran secara empiris”

Sedangkan menurut Surahman (1978:33) masalah diartikan “masalah adalah sebuah kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat diartikan sebagai rintangan yang mesti dilalui apabila kita ingin berjalan terus.”

Berdasarkan latar belakang masalah, bahwa pembangunan lingkungan mempunyai banyak permasalahan-permasalahan yang harus diperhatikan dengan aspek pembangunan. Sementara pembangunan itu sendiri membutuhkan partisipasi yang datangnya dari tokoh masyarakat sebagai tempat komunikasi.

Tokoh Masyarakat sebagai jembatan komunikasi antar warga tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam rencana pembangunan lingkungan. Dari sini berarti Tokoh Masyarakat dituntut untuk lebih memperhatikan permasalahan yang ada di kelurahan, karena hal ini juga merupakan tanggung jawabnya sebagai komunikator yang menampung keinginan warga masyarakat.

Maka timbul suatu permasalahan, selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah partisipasi tokoh masyarakat didalam pembangunan lingkungan di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ?

1.3 Pokok Bahasan

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik, dalam arti sudah menampakkan permasalahan dengan jelas, penelitian yang terarah, maka diperlukan adanya suatu

pembatasan. Hal ini penting agar tidak terjadi permasalahan yang dibahas terlalu luas cakupan.

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang termasuk kedalam lingkungan permasalahan dan faktor-faktor mana yang tidak. Seperti yang dijelaskan oleh Soetrisno (1989:8) bahwa "Pokok bahasan berfungsi mencegah suatu kemungkinan timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah penelitian".

Dengan memperhatikan pendapat diatas, maka dalam penelitian ini; adalah dengan menekankan partisipasi para tokoh masyarakat, didalam upaya berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya. Apakah mereka aktif, tidak aktif atau sedang-sedang saja. Menurut Gordon Allport dalam bukunya *The Psychology of Participation* yang dikutip dari Poetra (1988:51) disebutkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan ego/dirinya sendiri (pribadi), personalitas (kejiwaan) lebih daripada hanya jasmaniah saja. Jelas ditekankan bahwa partisipasi tidak hanya berhubungan dengan keikutsertaan aspek jasmaniah saja dalam suatu kegiatan, tapi juga keikutsertaan aspek mentalnya. Dalam bukunya *Human Relation at Work*, Davis menyebutkan ada 8 bentuk partisipasi yang dikutip oleh Poetra (1988:18) yaitu :

- Konsultasi, bentuk partisipasi yang bersifat jasa
- Sumbangan spontan, bentuk partisipasi berupa uang atau barang
- Mendirikan proyek berdikari (bentuk partisipasi bersumber dari dermawan, pihak ketiga)
- Mendirikan proyek berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunity atau keputusan rapat.
- Sumber dalam bentuk kerja
- Aksi massa
- Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
- Membangun proyek komunity yang bersifat otonom.

Davis (1962) dalam buku yang sama, menyebut ada enam jenis partisipasi yaitu:

1. Pikiran (*Psychological Participation*)
2. Tenaga (*Physical Participation*)
3. Pikiran dan Tenaga (*Participation and Physical Participation*)

4. Keahlian (*Participation with Skill*)
5. Barang (*Material Participation*)
6. Uang (*Money Participation*)

Sebelum jauh dibahas tentang Partisipasi Tokoh Masyarakat secara luas, terlebih dahulu perlu diuraikan tentang pengertian Partisipasi itu sendiri

Pengertian Partisipasi menurut Ndraha yang dikutip oleh Soekanto (1982:25) adalah "Keterlibatan dalam menyumbangkan ide, tenaga, materi atau menyumbangkan kontribusi pikiran, perasaan serta kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap tujuan akhir dan hasil yang telah dicapai".

Dari pendapat tersebut partisipasi pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat dengan menggunakan segala sumberdaya potensial yang ada dan dimiliki oleh masyarakat serta demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

Selain itu apabila kita lihat bahwa partisipasi yang muncul dimasyarakat, ternyata tidak selamanya timbul begitu saja dari inisiatif atau kehendak masyarakat itu sendiri, tapi terdapat juga partisipasi yang dipersuasi oleh pemerintah, terlihat pada masyarakat yang masih tergolong berbudaya desa, dimana inisiatif, motifasi, prakarsa dan tingkat pendidikan serta kemampuan ekonomi yang masih rendah.

Selain tersebut diatas pengertian partisipasi kita batasi adalah keterlibatan aktif warga masyarakat khususnya tokoh masyarakat, baik secara perseorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kemasyarakatan.

Masalah yang dihadapi dari operasionalisasi partisipasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu karena ciri struktur sosial masyarakat. Struktur sosial masyarakat menandai tingkah laku individu masyarakatnya, seperti yang dikemukakan oleh Soetarso, bahwa struktur sosial suatu masyarakat tidak dapat diragukan lagi pengaruhnya terhadap derajat integrasi didalam masyarakat. Dengan mudah dapat dilihat perbedaan yang menyolok diantara suatu desa dengan kota industri, juga suatu masyarakat sedang berkembang dengan masyarakat yang sudah maju industrinya. Perbedaan struktur sosial ini tidak dapat dilepaskan kaitannya

dengan perbedaan sikap dan tingkah laku yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam organisasi orientasi dari masyarakat ini.

Berikut ini ada beberapa lagi ciri masyarakat kota yang merupakan masalah solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Soekamto (1982:149) sebagai berikut.

- a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Hal ini disebabkan adanya cara berfikir yang rasional, pada perhitungan yang eksak yang berhubungan dengan realita masyarakat. Memang di kota-kota, orang juga beragama, akan tetapi pada umumnya pusat kegiatannya hanya tampak ditempat-tempat beribadah seperti misalnya gereja, masjid dan sebagainya. Diluar itu; kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Cara kehidupan yang demikian mempunyai kecenderungan kearah kehidupan warga desa yang cenderung kearah agama.
- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiritanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perseorangan atau individu. Di desa orang lebih mementingkan kelompok atau keluarganya. Di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, karena perbedaan kepentingan, perbedaan faham politik, perbedaan agama dan sebagainya. Di kota-kota para individu kurang berani untuk seorang diri menghadapi orang-orang lain dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang tak sama, kepentingan yang berbeda dan lain-lain. Nyata bahwa kebebasan yang diberikan kepada individu, tak memberikan kebebasan sebenarnya pada yang bersangkutan.
- c. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Di kota, tinggal orang-orang dengan beraneka warna latar belakang sosial dan pendidikan yang menyebabkan individu memperdalami suatu bidang kehidupan khusus yang menyebabkan suatu gejala bahwa warga kota tak dapat hidup sendirian secara individualistis. Pasti akan dihadapinya suatu persoalan hidup yang diluar jangkauan kemampuan. gejala demikian dapat menimbulkan kelompok-kelompok kecil (small group) yang didasarkan pada pekerjaan yang sama, kedudukan sosial yang sama dan lain-lain, yang semuanya dalam batas-batas tertentu membentuk pembatasan-pembatasan di dalam pergaulan hidup.

Gambaran-gambaran tentang ciri-ciri yang menonjol dari masyarakat kota tersebut di atas, akan dapat mendukung atau bahkan mengancam terciptanya partisipasi di kalangan tokoh berpengaruh di masyarakat kota.

Walaupun belum ada pengertian yang sama tentang partisipasi, namun disini dapat dikemukakan pengertian partisipasi dari sudut pandangan pekerjaan sosial, yang tentu erat kaitannya dengan peningkatan solidaritas sosial di masyarakat. Seperti yang dinyatakan Soelaiman (1985:6) sebagai berikut ini:

Keterlibatan aktif warga masyarakat secara perseorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa dan kesadaran tanggung jawab sosialnya.

Pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas menekankan adanya suatu keterlibatan aktif yang dilakukan warga masyarakat dalam upaya-upaya kemasyarakatan untuk pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut Soelaiman (1985:23) dari segi bentuknya partisipasi sosial dapat digolongkan ke dalam:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka;
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatory, dana sarana sebaiknya berasal dari masyarakat sendiri walaupun terpaksa keluar dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan;
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan;
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
- e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau kepanitiaan.

Uraian tentang bentuk partisipasi seperti dikemukakan diatas, tidak seluruh bentuk itu dapat diberikan oleh seseorang. Kadang-kadang seseorang akan berpartisipasi melalui bentuk-bentuk tertentu. Kesemuanya bergantung pada sasaran dimana partisipasi itu harus dilakukan. Sesuatu yang sangat menggembirakan, bila seseorang dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuknya.

Untuk mengukur tingkat partisipasi seseorang, tidak hanya bentuk partisipasi yang diberikan, akan tetapi frekuensi dan kualitas partisipasi juga merupakan ukuran penilaian. Pada partisipasi yang membutuhkan kontinuitas, frekuensi partisipasi serta kualitas partisipasi menentukan keberhasilan suatu kegiatan.

Kedudukan sebagai tokoh masyarakat bukan berarti tanpa proses untuk pengakuannya. Karena itu ia merupakan proses kepemimpinan. Di dalam terdapat obyek tertentu yang menjadi media proses kepemimpinan. Seperti organisasi atau institusi-institusi masyarakat lainnya. Maka disinilah proses kepemimpinan itu terjadi yang didalamnya mencakup dua unsur penentu bagi terjadinya proses kepemimpinan. Kedua unsur itu adalah pemimpin dan pengikut.

Dalam hubungan proses kepemimpinan dan pengintegrasian, Mac Iver menjelaskan sesuai yang dikutip oleh Surachman (1982:132-133) bahwa, "Penelitian dari Chample - Arensberg dan Whyte menunjukkan bahwa apabila antara individu terdapat hubungan pengikut - pemimpin, maka yang paling banyak mengambil prakarsa kearah pengintegrasian adalah pemimpin.". Hasil penelitian yang dikemukakan Mac Iver tersebut juga memberikan gambaran yang faktual bahwa kedudukan sebagai pemimpin menuntut peranan tertentu sesuai kedudukannya. Berbicara mengenai peranan, pemikiran kita lebih mengarah pada suatu fungsi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Levinson yang dikutip oleh Margono (1990:57) bahwa "Peranan (role) pada dasarnya lebih banyak berhubungan dengan fungsi".

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka kajian mengenai peranan Tokoh Masyarakat dalam penelitian ini, Penulis berpedoman pada fungsi-fungsi tokoh masyarakat yang dimiliki dalam lembaga ketahanan masyarakat desa misalnya.

Didalam Keputusan Presiden No.28 Tahun 1980 (1980:22) disebutkan diantaranya bahwa:

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan melaksanakan pembangunan.
- b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk pembangunan.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- d. Sebagai sarana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat serta antar warga itu sendiri.
- e. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan"

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut diatas, maka didalam pembahasan peranan Tokoh Masyarakat ini, penulis melihat dari empat indikator yang dapat mewakili dari lima fungsi tersebut diatas, dengan alasan empat indikator tersebut yang sedang dijalankan oleh Tokoh Masyarakat. Adapun keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyertaan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Dorongan tokoh masyarakat terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Penyuluhan akan manfaat hasil pembangunan
- d. Pemeliharaan hasil pembangunan oleh masyarakat

Jadi, berdasarkan pendapat tersebut maka dalam pembahasan mengenai partisipasi ini penulis melihat dari kedua type tersebut yaitu:

- a. Partisipasi yang dipersuasi oleh pemerintah.
- b. Partisipasi yang dilakukan atas dasar kesadaran

Peranan-peranan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat merupakan juga wujud partisipasi dalam kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu hal yang menuntut adanya partisipasi tokoh masyarakat adalah peningkatan solidaritas sosial. Peningkatan dapat berarti; menjaga, membina atau menstabilisasi solidaritas sosial.

Sedangkan tokoh masyarakat disini adalah meliputi Lurah atau pejabat-pejabat resmi pemerintah yang terstruktur dikelurahan serta ketua RT, RW atau ketua lingkungan. Adapun kemampuan kepemimpinan yang mereka miliki seperti pendapat O. Tead yang dikutip oleh Hartoyo (1986:34) dalam bukunya "The Art of Leadership" mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bekerjasama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedang Terry dalam bukunya "Principle of Managemen" mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok (Hartoyo; 1986:34). Sehingga dari

definisi tersebut dapat kita baca, bahwa pada kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok
- b. Kemampuan mengarahkan tingkah laku orang lain, bawahan atau kelompok

Setelah kita mengetahui tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan sebagaimana tersebut diatas erat kaitannya dengan peran tanggungjawab tokoh masyarakat dalam lingkungan.

Menurut Hartoyo (1986:34); tokoh masyarakat atau pimpinan formal ialah orang yang oleh organisasi tertentu ditunjuk sebagai pemimpin ataupun pengurus, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Jadi pengakuan terhadap kepemimpinan disini lebih didasarkan pada keputusan resmi dari suatu organisasi atau kelompok masyarakat, yang mana akan menimbulkan konsekwensi hak dan kewajiban bagi si pemimpin itu atau tokoh masyarakat tersebut.

Kemudian untuk pembahasan mengenai pembangunan, penulis lebih menekankan pada bidang pembangunan yang bersifat umum hal ini dengan pertimbangan peranan yang akan dilihat adalah partisipasi Tokoh Masyarakat dalam pembangunan lingkungan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Hal tersebut didukung oleh pendapat Sutrisno (1985:12) tentang tujuan penelitian, mengatakan bahwa “suatu research khususnya dalam ilmu pengetahuan empirik pada umumnya mempunyai tujuan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”

Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran suatu pengetahuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan penelitian

Ingin memperoleh gambaran dan mendiskripsikan partisipasi tokoh masyarakat dalam pembangunan lingkungan di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember .

1.4.2 Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu kesejahteraan sosial pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi instansi terkait dalam membuat kebijaksanaan tentang pembengunan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian sejenis.

1.5 Konsepsi Dasar

Didalam suatu karya ilmiah sudah menjadi keharusan adanya penyajian yang mendasar pemikiran penulis dalam usaha pemecahan masalah yang sedang dihadapi dalam penelitiannya.

Pandangan teoritis tersebut akan dapat membantu penentuan ruang lingkup yang dihadapi itu, karena dengan pandangan teoritis akan membantu pola pemikiran dan pandangan penulis dalam mempertimbangkan kelayakan dimana pada tahap berikutnya berusaha untuk menyempurnakan sebuah teori adalah digunakan sebagai pokok secara umum pengertian konsep Koenjaraningrat (1981:32), bahwa unsur dari penyelesaian kalau misalnya dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya diketahui pula fakta-fakta mengenai gejala-gejala yang akan menjadi pokok pengertian dan suatu konsep sebenarnya definisi singkat dari kelompok gerak atau fakta.

Sedangkan menurut Sutrisno (1989:30), konsep memiliki pengertian sebagai berikut:

“ Konsep merupakan abstraksi dari kejadian yang menjadi obyek suatu penelitian. Sedangkan dasar merupakan suatu azas yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi konsep dasar adalah suatu pandangan teoritis dan definisi singkat yang mendasari pemikiran kita untuk mencari jalan keluar atau pemecahan yang diselidiki oleh peneliti.”

Dari definisi konsepsi dasar tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa konsepsi dasar merupakan gambaran secara teoritis tentang suatu hal atau obyek dan merupakan suatu landasan berfikir dalam rangka usaha mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

Dengan berpedoman pada pendapat tersebut, maka penulis akan menjelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dewasa ini pembangunan senantiasa mengedepankan pendekatan terpadu yang bersifat menyeluruh. Pendekatan tersebut melihat keseluruhan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang meliputi berbagai macam bidang seperti bidang ideologi, sosial ekonomi dan budaya, yang semua itu saling berkaitan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Pendekatan terpadu tersebut yang dimaksud adalah pembangunan yang diupayakan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun pengertian kesejahteraan sosial yang dimaksud diatas seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pada pasal 2 (1984:182), yaitu:

“ Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Disinilah essensi sebenarnya dari tujuan pembangunan yang selama ini kita laksanakan yaitu untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila seperti yang penulis kemukakan diatas.

Sedangkan pembangunan daerah pedesaan pada dasarnya merupakan upaya untuk menjawab tiga jenis lingkungan masyarakat desa yaitu lingkungan alam, budaya dan sosial ekonominya. Untuk itu menurut Daldjoeni dan Suyitno (1983:37) perlu diperhatikan :

- a. Hambatan-hambatan pembangunan perlu dilihat baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar manusia.
- b. Usaha pembangunan harus dapat dirasakan sebagai usaha penyembuhan dari kenyataan hidup yang didambakan diri sendiri dan generasi yang akan datang.
- c. Masa depan desa tergantung dari kemampuan manusianya dalam menyadari kondisi dan memperbaiki kualitas hidupnya.”

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kesiapan dan kemampuan masyarakat desa untuk menjawab ketiga jenis lingkungannya perlu untuk ditingkatkan. Dan masalah ini sangat terkait dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu terus untuk ditingkatkan dalam rangka untuk peningkatan partisipasi didalam pembangunan.

Upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi tersebut, sangat berkaitan dengan masalah pendidikan dan pendapatan. Dan faktor inilah yang menurut anggapan selama ini yang menjadi faktor yang dapat menumbuhkan partisipasi suatu masyarakat didalam pembangunan. Untuk itu hendaknya faktor pendidikan dan faktor pendapatan ini mendapat perhatian yang lebih.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mashuri (1973:7), bahwa:

- “ Pendidikan adalah usaha manusia dengan sadar untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia jasmaniah dan rohaniah yang berlangsung seumur hidup didalam maupun diluar lingkungan sekolah dalam rangka pembangunan dan persatuan bangsa Indonesia dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.

Sedangkan menurut Soedjono (1983:14), memberikan pengertian sebagai berikut : "Pendidikan pada dasarnya adalah usaha manusia secara sadar dan terencana untuk membina manusia agar menjadi cerdas, terampil dan berbudi luhur. Jadi pada dasarnya merupakan proses pembinaan dan pembudayaan manusia."

Dari kedua pengertian pendidikan tersebut diatas, maka dapatlah kita artikan bahwa pendidikan adalah merupakan pembinaan, pembudayaan, bimbingan secara sadar agar manusia Indonesia yang dibina atau dibimbing dapat menjadi manusia Indonesia yang berkepribadian, cerdas, terampil dan berbudi luhur terhadap dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya serta dapat menjadi pelaku-pelaku pembangunan.

Sedangkan pendidikan itu sendiri mempunyai bentuk-bentuk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Comb (1977:37), yang mengklasifikasikan pendidikan menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang kita kenal dengan sebutan sekolah yaitu pendidikan yang teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.
- b. Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikat dengan peraturan-peraturan yang ketat dan mengikat.
- c. Pendidikan in-formal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar maupun tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati, didalam keluarga, didalam pekerjaan ataupun didalam kehidupan sehari-hari."

Berdasarkan bentuk pendidikan tersebut diatas, maka upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dalam pembangunan lingkungan, biasanya dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan-bimbingan sehingga dapat kita katakan bentuk pendidikan non-formal yang seringkali dilakukan. Terciptanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam masalah pendidikan, sebenarnya bukanlah tanpa sebab. Akan tetapi disebabkan karena keadaan ekonomi yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyoharjo (1987:38) bahwa "Adanya golongan masyarakat yang memiliki tingkat

pendidikan yang berbeda, yaitu tinggi, sedang dan rendah hal itu disebabkan karena kemampuan ekonomi yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.”

Untuk itu sangat tepat sekali program pemerintah dewasa ini yang memperhatikan masalah kemampuan ekonomi masyarakat dengan programnya JPS (Jaring Pengaman Sosial). Dengan program ini diharapkan agar kehidupan ekonomi masyarakat dapat lebih meningkat, sehingga pada gilirannya nanti dapat pula meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didalamnya menyangkut tingkat pendidikan dan pendapatan.

Upaya yang demikian merupakan suatu proses pembangunan ekonomi. Dengan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena tingkat pendapatan juga memiliki pengaruh terhadap cara bersikap masyarakat didalam menjawab permasalahan yang dihadapi didalam hal ini adalah cara solidaritasnya didalam pembangunan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Murder yang dikutip oleh Kartasasmita (1997:70), bahwa:

“ Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, jadi dengan pembangunan bidang ekonomi pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, maka partisipasi masyarakat akan meningkat pula.”

Senada yang dikemukakan oleh Slamet (1984:35), bahwa “Pendapatan merupakan faktor yang penting didalam proses partisipasi, atau dengan perkataan lain orang yang memiliki pendapatan tinggi mempunyai kecenderungan untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang memiliki pendapatan rendah.”

Dengan demikian dapat kita artikan, bahwa apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka akan ada kecenderungan meningkat pula partisipasi masyarakat didalam pembangunan.

Untuk itu dalam upaya peningkatan pendapatan, upaya yang perlu dilakukan

adalah dengan cara penggalian-penggalian potensi yang ada didalam masyarakat. Potensi tersebut hendaknya digali dan dikembangkan, sehingga potensi yang ada benar-benar dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana yang dikemukakan Mubiyarto dan Kartodirjo (1988:34), bahwa "Pada umumnya derajat pengetahuan dan partisipasi masyarakat pedesaan pada organisasi-organisasi yang baru masih kurang, kecuali partisipasi pada organisasi yang secara langsung memenuhi kebutuhannya."

Berhubungan dengan masalah partisipasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Baretha (1982:128), bahwa :

- a. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara fisik atau pribadi semata-mata didalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
- b. Kesadaran untuk memberikan kontribusi tergerak, uang dan tenaga.
- c. Kesiediaan untuk bertanggung jawab terbangkit atau tergerak."

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka dapat kita katakan bahwa partisipasi harus ada keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang biasanya berwujud suatu yang bersifat material maupun non-material.

Sedangkan menurut Slamet (1990:22) partisipasi adalah "Perwujudan sikap dan tingkah laku atau perilaku positif dalam serangkaian kerja sama atau dasar dalam mengambil suatu tindakan atau aktifitas"

Keadaan hubungan ini mendasari keterikatan antara individu dan atau kelompok didalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya keadaan hubungan ini dapat dinilai menurut kualitas dan frekuensinya. Didalam mencakup ketergantungan antara individu dan atau kelompok secara fisik dan psikologis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, tentunya ada nilai-nilai moral dan kepercayaan-kepercayaan akan pentingnya hubungan atau interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu, nilai moral dan kepercayaan ini berfungsi mengatur tata kehidupan bermasyarakatnya. Wujud nyata dari terjadinya hubungan antara individu dan atau kelompok, melahirkan pengalaman emosional bersama yang

akan memperkuat keadaan hubungan atau solidaritas sosial. Partisipasi menurut Devis yang dikutip oleh Margono (1990:102), Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan sumbangan kepada tujuan yang hendak dicapai serta bertanggung jawab akan tujuan.

Partisipasi harus dilaksanakan dengan kesadaran, Swasono (Suara Merdeka :1990) dalam artikel yang berjudul Partisipasi, mengatakan partisipasi adalah inti dari demokrasi ialah bukanlah yang berarti semua harus bilang "ya", namun memungkinkan partisipasi bilang tidak, memang demikian seharusnya karena partisipasi bukan mobilisasi"

Partisipasi yang datang dari dalam diri harus didahului oleh motif yang kuat. Motif menurut Bereelson, seperti yang dikutip dari Siswanto (1987:34) didefinisikan sebagai berikut : "Motif sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan/ moves dan mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah pencapaian kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan."

Dan bahwa bukan karena sikap anti partisipasi, maka muncul sikap masa bodoh, tapi posisi sebagai obyek itulah yang dengan sendirinya tidak akan menumbuhkan motivasi. Sesuai dengan yang dikutip Tjokroamidjojo (1984:223). dengan kata lain, ada kalanya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi daripada partisipasi

Koentjaraningrat (1981:74) menyebutkan bahwa: "Partisipasi rakyat terutama rakyat pedesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut 2 tipe yang pada prinsipnya berbeda. Pertama: partisipasi dalam aktifitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus. Kedua; partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan."

Berdasar pengertian tersebut, maka pengertian partisipasi tipe I seseorang atau masyarakat perlu diajak, dimotivasi, dipersuasi atau diperintah untuk ikut serta

biasanya berupa pembangunan fisik, sehingga partisipasi masyarakat tersebut masih bersifat sementara, karena dalam pelaksanaan kegiatan atau dasar suruhan dari orang lain. Sedangkan pada tipe II; partisipasi tersebut tidak disertai dengan aktifitas bersama yang bersifat khusus, ini biasanya tidak memerlukan partisipasi masyarakat secara paksa atau tidak atas dasar perintah dari orang lain, tapi dengan kesadaran, keyakinan, dan kemauan mereka sendiri, bahwa proyek pembangunan tersebut sangat bermanfaat baginya.

Hubungan-hubungan yang dilakukan oleh individu yang satu dengan yang lainnya atau dengan kelompok, bukan tanpa alasan atau sekedar berhubungan. Akan tetapi karena tujuan-tujuan tertentu. Di masyarakat kota tujuan-tujuan melakukan hubungan antar warga masyarakatnya banyak didasari oleh ketergantungan fungsional diantara mereka. Ketergantungan ini dipengaruhi oleh adanya batas-batas yang tegas pada pembagian pekerjaan dan spesialisasi pekerjaan di masyarakat kota. Sehingga alasan melakukan hubungan disebabkan juga karena keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh individu yang satu, tidak dimiliki individu oleh individu yang lainnya. Maka timbul penghargaan atas masing-masing individu atau kelompok. Sebagai manifestasinya, mereka lalu berhubungan, memberikan perhatian terhadap sesamanya untuk terlibat secara emosional, ataupun bekerjasama guna penanggulangan masalah-masalah bersama.

Walaupun belum ada pengertian yang sama tentang partisipasi, namun disini dapat dikemukakan pengertian partisipasi dari sudut pandang Pekerja Sosial, yang tentu erat kaitannya dengan peningkatan solidaritas sosial di masyarakat seperti yang dinyatakan oleh Soelaiman (1985:6) sebagai berikut:

“Keterlibatan aktif masyarakat secara perseorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembagian kesejahteraan sosial didalam dan atau diluar lingkungan masyarakatnya atas dasar rasa dan kesadaran tanggung jawab sosialnya.”

Keadaan hubungan ini mendasari keterikatan antara individu dan atau kelompok didalam kehidupan bermasyarakat . Kiranya keadaan hubungan ini dapat dinilai menurut kualitas dan frekuensinya. Didalam mencakup ketergantungan antara individu dan atau kelompok secara fisik dan psikologis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, tentunya ada nilai- nilai moral dan kepercayaan-kepercayaan akan pentingnya hubungan atau interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu, nilai-nilai moral dan kepercayaan-kepercayaan ini berfungsi mengatur tata kehidupan bermasyarakatnya. Wujud nyata dari terjadinya hubungan antara individu dan atau kelompok , melahirkan pengalaman emosional bersama yang akan memperkuat keadaan hubungan atau partisipasi sosial.

Sedangkan dalam pembangunan itu sendiri perlu adanya teknik atau metode penyelenggaraannya, seperti pendapat Kartasmita (1996:48) bahwa:

“ Dalam pembangunan perlu beberapa fungsi yang cukup nyata (*distinct*), yakni : (1) perencanaan, (2) pengerahan (mobilisasi) sumber daya, (3) pengerahan (menggerakkan) partisipasi pimpinan formal/informal, (4) penganggaran, (5) pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, (6) koordinasi, (7) pemantauan dan evaluasi, dan (8) pengawasan.”

Sehingga berdasarkan pendapat tersebut pembangunan hendaknya ada peran serta pimpinan atau tokoh formal guna kelangsungan suatu rencana kerja yang disepakati bersama antara tokoh masyarakat setempat.

Pada tahap awal pembangunan, peranan pemerintah yang diwakili tokoh masyarakat formal biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Namun perlu juga dipertimbangkan bahwa studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya peran serta rakyat akibat kurangnya pula partisipasi langsung tokoh masyarakat sebagai panutan dan mengarahkannya. Bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan, sehingga perlu sekali manajemen pembangunan yang merupakan tugas dari tokoh masyarakat untuk

manajemen pembangunan yang merupakan tugas dari tokoh masyarakat untuk menjamin bahwa pembangunan: (1) harus menguntungkan rakyat, (2) harus dipahami maksudnya oleh rakyat, (3) harus mengikutsertakan rakyat dan tokoh dalam pelaksanaan, (4) dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh para tokoh masyarakat, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas penting tokoh masyarakat untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan. Upaya itu dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan serta kegiatan pembangunan pemerintah diarahkan untuk menunjang, merangsang dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat.

1.6 Definisi Operasional

Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur (Singaribun, 1978:23) dan yang dimaksud Definisi Operasional menurut (Tampubolon 1988:32) : Definisi Operasional pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mengubah konsep-konsep tentang fakta-fakta sosial yang menggambarkan gejala yang dapat yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya oleh orang lain.

Untuk itulah penulis membuat definisi operasional sebagai berikut : Partisipasi menurut Soerjono (1982:74) adalah suatu gejala dimana organisasi ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingan ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kepentingannya. Untuk lebih jelasnya seperti yang tercantum dalam Kamus Iktisar Bahasa Indonesia Poerwadarminta (1987:650) yang dimaksud partisipasi adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan, peran serta. Partisipasi yang dimaksud disini

adalah keikutsertaan Tokoh Masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Seperti pendapat Soelaiman yang bisa kita jabarkan, bahwa sehubungan dengan masalah partisipasi paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

- a. partisipasi dalam proses pembuatan keputusan bersama.
- b. partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program
- c. partisipasi dalam usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam atau diluar lingkungan masyarakat

Berdasarkan batasan tersebut, terlihat bahwa partisipasi kembali kepada peran yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, sehingga mengarah kepada perihal yang dilakukan individu yang biasanya oleh masyarakat diberikan peran atau peluang-peluang untuk pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dari variabel partisipasi tersebut yang menjadi indikator adalah sebagai berikut:

a. Penyertaan Tokoh Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

Seperti yang dikemukakan oleh Emrich dikutip oleh Mubiyarto (1983:22), bahwa partisipasi harus dimulai dari tingkat paling bawah yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan pembangunan

Kemudian Emrich yang dikutip oleh Mubiyarto (1983:26) juga mengemukakan bahwa partisipasi dalam hubungannya dengan alasan perencanaan pembangunan desa, dapat dikategorikan

- * Kategori aktif : Apabila Tokoh Masyarakat sering secara langsung ikut dalam proses perencanaan pembangunan serta memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan ide-ide pembangunan dan tokoh masyarakat juga menyampaikan ide-ide pembangunan.

- * Kategori kurang aktif : Apabila Tokoh Masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan jarang menyampaikan ide-ide pembangunan tapi masyarakat pasif atau tidak menyampaikan ide yang dimiliki.
- * Kategori tidak aktif : Apabila Tokoh Masyarakat menyertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak pernah menyampaikan ide-ide yang dimiliki.

Kemudian untuk mengkategorikan indikator ini, penulis berpegang pada pendapat tersebut diatas.

b. Penyertaan Tokoh Masyarakat Untuk ikut serta dalam Pelaksanaan Pembangunan

Untuk melihat indikator upaya Tokoh Masyarakat ikut serta didalam proses pelaksanaan pembangunan, penulis melihat dari volume frekuensi daripada antusiasisme masyarakat didalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pada indikator ini penulis juga mengkategorikan dalam kategori aktif, kurang aktif dan tidak aktif.

- * Kategori aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan sering secara aktif untuk terlibat secara langsung didalam proses pembangunan tersebut.
- * Kategori kurang aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan jarang untuk aktif dan terlibat secara langsung didalam proses pembangunan tersebut..

* Kategori tidak aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan tidak pernah ikut dalam proses pembangunan secara langsung.

c. Evaluasi akan hasil Pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan berikutnya menunjang dan dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan berikutnya menunjang dan dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai.

Dalam rangka evaluasi, dikenal adanya evaluasi kinerja (performance evaluation) yang dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil (result) dan manfaat (benefit), termasuk pula dampaknya. Pelaksanaan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara sistematis dan melembaga. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan rencana dan program-program pembangunan mengarah pada terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dicapainya hasil yang optimal dari perencanaan sampai pelaksanaan yang ingin dihasilkan.

Untuk melihat Tokoh Masyarakat dalam upayanya mengevaluasi didalam pembangunan, maka penulis akan melihat volume evaluasi yang dilakukan tokoh

masyarakat tersebut.

Didalam melihat indikator ini penulis mengkategorikan kedalam tiga kategori; aktif, kurang aktif dan tidak aktif.

- * Kategori aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan sering mengevaluasi akan hasil pembangunan tersebut sehingga masyarakat mampu menyerap, mengerti dan memahami serta bisa menikmati hasil pembangunan tersebut dengan maksimal dalam praktek.
- * Kategori kurang aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan jarang mengevaluasi akan hasil pembangunan sehingga masyarakat sebagian kecil saja mampu menyerap, mengerti, dan memahami materi penyuluhan serta bisa menikmati secara maksimal dalam praktek.
- * Kategori tidak aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan tidak mengevaluasi penyuluhan akan hasil pembangunan tersebut.

d. Pemanfaatan hasil pembangunan.

Dalam melihat indikator pemanfaatan akan hasil pembangunan tersebut, penulis melihat dari sisi upaya Tokoh Masyarakat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan daripada hasil pembangunan tersebut.

Kemudian untuk memudahkan didalam menganalisa data, maka penulis mengkategorikan kedalam tiga kategori, yaitu:

- * Kategori aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan bisa merasakan secara langsung menikmati hasil pembangunan.

* Kategori kurang aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan jarang menikmati merasakan secara langsung hasil pembangunan.

* Kategori tidak aktif : Jika Tokoh Masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan tidak pernah merasakan hasil pembangunan.

1.7 Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penentuan Lokasi

Lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan pertimbangan atas data yang diperoleh berdasar observasi awal. Daerah observasi banyak pergeseran budaya terutama masalah partisipasi mulai dari Tokoh sampai pada tingkat pemuda, dimana pemuda sebagai bakal calon penerus penduduk setempat untuk lebih beradaptasi dan bersosialisasi pada umumnya serta pembangunan lingkungan pada khususnya.

2. Penentuan Populasi

a. Populasi sampling

Berdasar observasi, maka tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang dijadikan objek penelitian sejumlah 118 tokoh masyarakat yang tersebar di seluruh kelurahan.

b. Populasi sasaran

Dari populasi sampling untuk menetapkan populasi sasaran diperlukan syarat sebagai berikut :

1. Baik tokoh formal dan informal,
2. Telah tinggal di Kelurahan Jember Lor sekurang-kurangnya 5 tahun,
3. Mempunyai pekerjaan tetap,

4. Berkedudukan sebagai Lurah, aparat desa, RW, RT atau Ketua Lingkungan di daerah tersebut.

Setelah dikenai persyaratan di atas maka populasi sarannya adalah 50 tokoh masyarakat yaitu terdiri dari 5 aparat desa yaitu Lurah dan 4 stafnya; 15 RW; 30 RT atau Ketua Lingkungan.

3. Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini bisa ditentukan jumlah sampelnya dan dalam penentuan sampelnya nanti menggunakan metode proporsional sampling, yaitu pemilihan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Sifat pengambilan sampel yang ideal menurut Kasto dalam Mantra seperti dikutip Sutrisno (1989:14) adalah:

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi.
2. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian.
3. Sederhana, mudah dilakukan.
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin.

Sedangkan besar kecilnya sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian sampai saat ini masih belum ada ketentuan dan ketepatan pasti. Maksudnya beberapa persen sampel yang harus diambil dari suatu populasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno (1989:73) bahwa tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari jumlah populasi yang tersedia, juga tidak ada batasan yang jelas dengan apa yang dimaksudkan dengan besar kecilnya sampel. Sehingga dalam penelitian ini ditetapkan sampel sebanyak 50 orang tokoh dengan alasan seluruh sampel tersebut mempunyai syarat dan ciri yang sama dengan populasi sasaran (homogenitasnya tinggi) jumlah sebesar itu kepala keluarga di kelurahan Jember Lor dapat terwakili dan representatif.

sumber informasi masyarakat dan jelas bagaimana keberadaan responden, yang penarikannya dilakukan cara sampling *without replacement*. Dimaksudkan disini bahwa individu yang sudah ditarik tidak dimasukkan kembali dalam kelompok populasi sasaran untuk penarikan individu berikutnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari berbagai kegiatan pencatatan data dari berbagai sumber lain yang telah tersedia. Adapun metode-metode yang digunakan adalah:

a. Metode Observasi

Diperoleh untuk memperoleh lebih banyak keterangan dari masalah yang akan diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas. Seperti yang diistilahkan oleh Sutrisno (1989:153) bahwa observasi berfungsi eksplorasi. Selain diperoleh gambaran yang lebih jelas, mungkin pula petunjuk pemecahannya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati berbagai aktifitas masyarakat seperti yang tertera dalam pokok bahasan.

b. Metode Kuisioner

Metode ini dilakukan melalui daftar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan cara dibagikan atau dibacakan untuk memperoleh data berupa jawaban.

Berhubungan dengan masalah penelitian, Kartono (1983:143) menyatakan :
“ Angket atau kuisioner adalah suatu penyelidikan mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum (banyak orang), dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu daftar pertanyaan berupa formulir-formulir diajukan secara tertulis kepada sejumlah obyek untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan (respon) tertulis seperlunya”.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis menyediakan daftar pertanyaan yang telah dibagikan kepada responden.

Sedangkan jenis kuisionier yang penulis gunakan adalah kuisionier yang bersifat tertutup dan terbuka. Dimana sebagian pertanyaan sudah tersedia jawabannya dan responden tinggal memilih yang sesuai dengan keadaannya. Sedangkan sebagian pertanyaan lainnya memerlukan jawaban dari responden.

c. Teknik Wawancara

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka peneliti tidak hanya cukup melaksanakan observasi dan membagikan daftar pertanyaan dalam menggali data. Wawancara juga merupakan satu kegiatan yang perlu dilakukan, hal ini agar lebih dalam untuk penggalan data yang ada dan yang diperlukan.

Menurut Sutrisno (1982:192), yang dimaksud teknik wawancara adalah:

“Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain, mendengar dengan telingannya sendiri. Ini tampaknya alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial”.

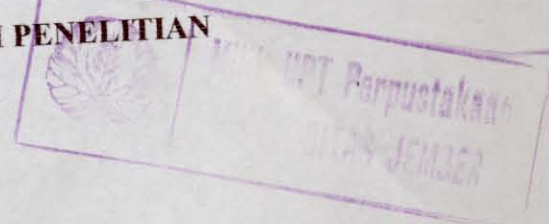
Pada umumnya teknik wawancara dapat dipakai dengan baik untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan dipergunakan untuk melengkapi metode angket yang dalam hal ini juga digunakan.

5. Metode Analisa Data

Analisa data kualitatif, menurut Surachman (1982:195) merupakan analisa terhadap data-data yang berwujud kata-kata. Penulis akan menggunakan prinsip kategorisasi data dengan penafsiran data. Dengan demikian penulisan menggunakan analisa data kualitatif

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, namun analisa data kuantitatif juga digunakan seperti misalnya dalam bentuk tabulasi data-data yang didapat di lapangan.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN



2.1 Lokasi Penelitian (Keadaan Geografis)

2.1.1 Letak

Kelurahan Jember Lor memiliki luas 347,176 Ha dengan jumlah penduduk 19.352 jiwa. Tanah seluas yang didiami penduduk tersebut sudah termasuk tanah makam, jalan raya, tanah lapang, sungai dan tanah kota Kabupaten.

Wilayah Kelurahan Jember Lor ini berada di pusat kota Jember. Wilayah ini terdapat pusat-pusat kegiatan ekonomi yang cukup penting bagi warga kota disekitarnya, seperti pusat belanja, pendidikan, olah raga maupun unit-unit kegiatan ekonomi lainnya. Demikian pula arus transportasi darat yang menunjuk pada tingkat keramaian sebagai jalur antar kota yaitu jalan menuju kota sekitar Banyuwangi-Bondowoso. Hal ini disebabkan jalur tersebut sebagai salah satu jalur luar bagi transportasi maupun transportasi menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi yang cukup banyak. Kesemuanya itu mempengaruhi segi-segi kehidupan masyarakat Jember Lor.

Gambaran ini mengukuhkan bahwa masyarakat Kelurahan Jember Lor berada dalam sistem kehidupan masyarakat perkotaan, dimana dominasi kegiatan perekonomian mengambil peranan penting dan berpengaruh terhadap sistem sosial masyarakatnya.

Ditinjau dari tata letak pemetaan wilayah Kelurahan Jember Lor memiliki batas-batas yang meliputi yaitu :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : dibatasi Kelurahan Patrang |
| Sebelah Selatan | : dibatasi Kelurahan Jember Kidul |
| Sebelah Barat | : dibatasi Kelurahan Gebang / Slawu |
| Sebelah Timur | : dibatasi Kelurahan Sumbersari dan Patrang |

Kelurahan Jember Lor berada disebelah utara pusat kota kira-kira 1 Km, berada di ketinggian 89 m diatas permukaan laut serta dengan curah hujan 4,001 mm/th. Kelurahan Jember Lor bersama sembilan kelurahan lainnya termasuk dalam kecamatan Patrang Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.

Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sedemikian rupa berarti setiap hektar didiami oleh 55 orang penduduk tetap. Sedangkan untuk memperlancar kegiatan administrasi dan pengorganisasian masyarakat kelurahan tersebut terbagi dalam 6 lingkungan 25 Rw yang meliputi 76 Rt.

Mengingat kelurahan ini berada dipusat kota maka sangatlah mudah untuk mendapatkan alat transportasi dan selain itu dominasi penduduk setempat sudah mempunyai kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, sedangkan angkutan umum selain becak(transportasi tradisional) ojek(jasa transportasi sepeda motor), angkot dan taxi.

2.1.2 Pola Perkampungan

Menurut Bintarto seperti yang disitir oleh Putra (1990:22), ada tiga macam pola perkampungan yang biasa kita dapatkan komunitas orang Jawa, yaitu *incleated agricultural village community*, *line village community*, *open country* atau *trade center community*. Masing-masing pola ini ternyata muncul di daerah-daerah dengan kondisi geografis yang berbeda.

Pola perkampungan pertama misalnya, menurut Bintarto banyak kita temukan di daerah lereng gunung atau pegunungan yang tanahnya cukup subur disertai kemiringan yang cukup besar. Cirinya antara lain, rumah penduduk bergerombol berdekatan sedangkan tanah pertanian jauh dari pemukiman rumah penduduk tersebut. Jika tanah daerah tersebut subur maka penduduk daerah tersebut padat begitu pula sebaliknya.

Pola perkampungan yang kedua, *line village community* banyak kita lihat disepanjang jalur sungai yang dapat dipakai sebagai jalur lalu lintas. Pola yang seperti ini tampak di tepi jalan antar kota, pinggiran kota dan daerah antar pedesaan dan kota.

Pola yang terakhir tampak di daerah pertanian dimana tempat tinggal bersifat menyebar di daerah pertanian, sedang perumahan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan jalur lalu-lintas. Pola seperti ini terdapat di daerah subur maupun tidak subur. Disamping itu, pola semacam ini seringkali tampak di daerah pegunungan.

Berdasarkan klarifikasi tersebut, maka ada dua macam pola perkampungan di Kelurahan Jember Lor, yaitu pola perkampungan open country trade center community dan neccleated agricultural village community. Pola trade center community terlihat lebih banyak mendominasi daripada tipe pola perkampungan yang kedua yaitu neccleated agricultural village community. Pola perkampungan yang kedua lebih banyak terlihat menyebar dipinggiran dan sebagian di sepanjang jalan di pedalaman.

Di berbagai perkampungan ini, penduduk tinggal di dalam rumah-rumah dengan arsitektur rumah yang lebih modern dan sebagian masih menggunakan arsitektur rumah tradisional Jawa. Untuk mereka yang sudah mengenal bentuk rumah yang lebih modern biasanya milik pedagang ataupun pendatang yang berprofesi sebagai wiraswasta dan pegawai negeri sipil yang berwawasan lebih baik. Tapi sebagian besar bentuk rumah di kelurahan ini sudah agak modern dan berbentuk rumah perkampungan.

Berdasarkan bahan bangunan yang dipakai untuk membangun rumah-rumah di tempat penelitian, dapat dibedakan menjadi rumah permanen, yaitu rumah dengan lantainya terbuat dari tegel atau semen dan beratapkan genteng, rumah sederhana yaitu rumah yang dindingnya terbuat dari gedeg (anyaman dari bambu) atau papan dan rumah semi permanen yaitu rumah yang sebagian besar terbuat dari tembok tetapi belum berlantainya tegel atau semen serta beratapkan genteng. Rumah-rumah di kelurahan Jember Lor sebagian besar sudah berbentuk rumah permanen dengan lantai rumah yang terbuat dari tegel dan semen dengan beratap genteng dan sejenisnya.

2.1.3 Flora dan Fauna

Kelurahan Jember Lor merupakan daerah dataran rendah yang terletak di pegunungan dan beriklim tropis serta mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau yang membujur dari barat ke timur, dengan ketinggian rata-rata 89 m di atas permukaan laut. Curah hujan disini rata-rata 4,001 mm/th.

Digital Repository Universitas Jember

Tanah dibagian timur dan selatan lebih banyak dibuat tempat pemukiman dan prasarana pemerintahan dan pendidikan. Bagian barat dan sebagian utara daerahnya subur dan lebih banyak disentuh pengairan. Persawahan di Kelurahan Jember Lor mendapat pengairan dari sungai Poreng yang terletak disebelah barat kelurahan tersebut.

Kelurahan Jember Lor dengan luas 347,176 hektar, diatas tanah yang cukup luas ini, penduduk mengusakan berbagai macam tanaman, yang dalam hal ini dibedakan menjadi tanaman sawah, tanaman tegal, tanaman perkebunan, dan empang. Tanaman perkebunan dalam arti yang diusahakan pemerintah dalam bentuk pusat penelitian yang dikhususkan pada tanaman kakao (cokelat). Sedangkan jenis tanaman perkebunan lain yang diusahakan rakyat seperti tembakau dapat kita temui.

Secara bergantian, mengikuti musimnya, penduduk mengusahakan tanaman yang berbeda diatas lahan pertanian mereka. Ada juga petani yang terus-menerus menanam padi karena sawah mereka bisa mendapat pengairan yang tetap sepanjang tahun. Pada saat penelitian dilaksanakan banyak petani yang menanam padi dan sebagian tebu.

Adapun hewan yang diusahakan oleh masyarakat di daerah penelitian adalah sebagai berikut, ada berbagai hewan yang dipelihara oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sumber penghasilan tambahan atau pokok. Heawan yang ditenak antara lain ayam, angsa, itik, kambing, dan sapi. Sekarang ini peternakan yang masih cukup berkembang di Kelurahan Jember Lor adalah peternakan ayam saja.

2.1.4 Fasilitas Desa

2.1.4.1 Fasilitas Ibadah

Mengingat pemeluk agama mayoritas di dalam penduduk Kelurahan Jember Lor beragama Islam dan terbesar maka tidak mengherankan jika disetiap dusun fasilitas ibadah bagi pemeluk agama ini ada;

Tabel 1; Jumlah fasilitas Ibadah Kelurahan Jember Lor

No	Fasilitas Ibadah	Jumlah
1	Masjid	12
2	Mushola	40
3	Gereja	1
4	Vihara	-
5	Pura	-

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Dari tabel tersebut memang menunjukkan kehidupan agama Islam rupanya yang paling berkembang. Untuk para pemeluk agama lainnya ternyata jarang dan hampir tidak ada sarana ibadah di kelurahan tersebut sehingga kegiatan para pemeluknya tidak tampak.

2.1.4.2 Fasilitas Kesehatan

Yang dimaksud dengan fasilitas disini lebih ditunjukkan pada fasilitas bangunan fisik, bukan pada personal yang membina kesehatan masyarakat di desa. Disini terdapat beberapa rumah sakit umum swasta maupun negeri dan rumah sakit khusus serta poliklinik.

Tabel 2, Jumlah Fasilitas Kesehatan Kelurahan Jember Lor

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	RS Umum Pemerintah	2
2	RS Umum Swasta	2
3	RS Bersalin	1
4	RS Sanatorium	-
5	RS Jantung/Paru	1
6	Poliklinik/Balai Penyuluhan Masyarakat	5
7	Laboratorium	2
8	Apotik	5

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Melihat sarana kesehatan yang memenuhi keinginan masyarakat. Jelas masyarakat setempat tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan kesehatan yang terjamin.

2.1.4.3 Fasilitas Olah Raga

Ada beberapa fasilitas olah raga di Kelurahan Jember Lor yaitu:

Tabel 3: Fasilitas Olah Raga Kelurahan Jember Lor.

No	Fasilitas Olah Raga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	2
2	Lapangan Basket	-
3	Lapangan Volly	7
4	Lapangan Bulu Tangkis	8
5	Lapangan Tenis	6
6	Lapangan Atletik	-
7	Kolam Renang	-
8	Fitnes	3
9	Rumah Bilyard	1
10	Lapangan Golf	-

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Satu hal yang jelas yaitu bahwa kegiatan olah raga di kelurahan ini hanya bersifat sementara atau musiman. Jika olah raga bulutangkis sedang populer, didesa ini kita dapat melihat banyak muda-mudi berlatih bulutangkis, tetapi begitu olah raga ini sudah kurang populer atau tidak ada peristiwa atau pertandingan nasional terutama yang disiarkan di televisi mereka berangsur-angsur akan mundur dari kegiatan ini.

2.1.4.4 Fasilitas Ekonomi

Dalam fasilitas ekonomi ini tercakup antara lain pasar, warung, toko, bank, kaki lima, dan sebagainya. Untuk masyarakat Kelurahan Jember Lor mempunyai pasar regional yang letaknya 1 km dari Kelurahan Jember Lor. Penduduk Kelurahan Jember Lor menggunakan pasar tersebut untuk berbelanja ataupun untuk berjualan bersama penduduk desa lain.

Meskipun letak pasar yang relatif dekat namun tetap berdiri beberapa warung-waraung dan toko-toko kecil yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jumlah kecil dan yang mendesak. Tentu saja sangat repot bagi penduduk jika mereka hanya mengandalkan pasar itu saja sebagai tempat mencari kebutuhan sehari-hari dan munculnya warung dan toko ini telah banyak membantu penduduk. Warung dan toko tersebut antara lain menjual barang-barang seperti sayur-sayuran, bumbu, minyak goreng, minyak tanah dan sebagainya. Selain warung dan toko seperti ini ada juga warung dan toko yang

menjual barang-barang kelontong seperti berbagai alat tulis, sandal, lampu teplok, senter, baterai, sabun cuci, sabun mandi, ember, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini sering kali sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Warung makanan selama sepuluh tahun banyak bermunculan karena untuk memenuhi kebutuhan para karyawan pemerintahan dan swasta serta masyarakat setempat sendiri karena seringkali mereka tidak sempat untuk memasak. Dari warung-warung makanan ini orang dapat membeli makanan seperti soto, gulai, berbagai sayuran dan sebagainya. Warung makanan ini sangat banyak terdapat di kelurahan ini.

Fasilitas Ekonomi lainnya yang tidak kalah pentingnya bagi penduduk kelurahan adalah bank dan koperasi. Bank dan koperasi disini adalah untuk memberi pelayanan simpan dan pinjam kepada golongan ekonomi lemah untuk memulai usahanya.

Tabel 4: Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kelurahan Jember Lor Tahun 1998

No	Fasilitas Ekonomi	Jumlah
1	Pasar	2
2	Warung	146
3	Toko	130
4	Kaki Lima	48
5	Super Market / pasar Swalayan	-
6	Bank	6
7	Koperasi	3

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

2.1.4.5 Fasilitas Lain

Fasilitas penting lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah makam. Ada empat buah makam di kelurahan Jember Lor, dan tampaknya di setiap dusun mempunyai makam sendiri-sendiri. Ada beberapa makam yang khusus untuk umum baik masyarakat sekitar maupun masyarakat lain di luar kelurahan.

Selanjutnya adalah fasilitas hiburan, sebenarnya tidak ada fasilitas hiburan di kelurahan ini, kalau boleh dikatakan tidak ada. Disini tidak ada gedung pertunjukan khusus untuk pementasan kesenian atau hiburan. Fasilitas yang cukup menghibur masyarakat setempat adalah radio dan televisi, yang merupakan milik individu-individu.

Biasanya setiap malam minggu ada latihan kesenian silat yang diadakan di lapangan pertunjukkan ini banyak penontonnya. Jika mereka ingin mendapatkan hiburan lain seperti menonton film mereka harus pergi ke pusat kota. Tetapi mereka pada umumnya pergi ke pusat kota karena pada umumnya fasilitas hiburannya lebih lengkap.

a. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi merupakan sarana yang sangat penting bagi kelancaran hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain serta kegiatan ekonomi, apalagi desa ini selain merupakan desa yang sarat akan hasil pertanian, perkebunan tetapi juga daerah pendidikan termasuk pemerintahan. Maka untuk memperlancar kegiatan transportasi sebagai penunjang sarana dan prasarana transportasi dibutuhkan prasarana jalan yang memadai dan sarana yang cukup.

Untuk prasarana jalan di kelurahan Jember Lor sudah cukup memadai dalam artian sudah cukup baik meskipun masih terkesan sempit dibandingkan jumlah armada angkutan yang melewatinya. Tetapi apabila dilihat dari sisi pengangkutan hasil pertanian, perkebunan dan kegiatan ekonomi untuk jumlah armada angkutan dan jenis nya sudah memadai.

b. Sarana Komunikasi

sarana komunikasi memiliki peranan yang sangat besar dalam mengubah kehidupan penduduk setempat. Dengan sarana komunikasi kita dapat melihat mendengar kemajuan zaman ataupun kehidupan di daerah lain yang lebih kompleks dibandingkan dengan kehidupan di kelurahan ini. Sarana komunikasi berupa radio dan televisi adalah alat yang banyak kita dapati sedangkan surat kabar majalah buku bacaan dan telepon juga ada tetapi sifatnya terbatas dan hanya dinikmati oleh orang tertentu saja.

2.2 Penduduk

2.2.1 Kependudukan dan Pendidikan

Berdasarkan data kantor Kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Jember Lor pada tahun 1997/1998 adalah 19.352 jiwa (4873KK). Jumlah KK laki-laki 4162 Jiwa dan perempuan 711 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki 9062 dan perempuan 10290 jiwa. Luas wilayah Kelurahan Jember Lor 3471 Km², jadi kepadatan penduduk Kelurahan Jember Lor adalah 0,18 orang per kilometer persegi.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tahun 1997/1998 di kelurahan Jember Lor dapat dilihat pada tabel 5. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk pria.

Tabel 5: Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin di Kelurahan Jember Lor

No	Usia	F	%	F	%	F	%
1	0-14	972	10,7	842	8,2	1814	9,4
2	15-29	1315	14,5	2011	19,6	3326	17,2
3	30-44	4012	44,2	4123	40,13	8135	42
4	45-59	1541	17	1872	18,2	3413	17,6
5	59-100	1240	13,6	1424	13,9	2664	13,8
Jumlah		9.080	100	10.272	100	19.352	100

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Dari tabel mengenai komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang masuk dalam usia kerja adalah 14.874 jiwa atau 76,8%. Angka ini diperoleh berdasarkan asumsi bahwa usia kerja berada antara umur 15-59 tahun sebab pada usia tersebut diperhitungkan orang sudah bisa dan masih mampu bekerja.

Tabel 6: Jumlah Kelahiran di Kelurahan Jember Lor 1997-1998

No	Tahun	Kelahiran	
		Laki-laki	Perempuan
1	1988-1989	12	21
2	1989-1990	14	19
3	1990-1991	7	15
4	1991-1992	9	17
5	1992-1993	11	9
6	1993-1994	13	11
7	1994-1995	7	16
8	1995-1996	9	15
9	1996-1997	11	19
10	1997-1998	13	21
Total		106	163

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Tabel jumlah kelahiran di kelurahan menunjukkan jumlah kelahiran perempuan terbanyak pada tahun 1988 sampai 1989 dan jumlah terendah pada tabel menunjukkan antara tahun 1990 sampai 1991, sedangkan jumlah kelahiran terbanyak pada kelompok laki-laki pada tahun 1989 sampai 1990 dan kelahiran terendah tahun 1990 sampai 1991 serta tahun 1994 sampai 1995.

Tabel 7: Jumlah Pendatang Di Kelurahan Jember Lor

No	Tahun	Pendatang	
		Laki-laki	Perempuan
1	1988-1989	33	45
2	1989-1990	21	19
3	1990-1991	19	15
4	1991-1992	22	17
5	1992-1993	17	9
6	1993-1994	15	24
7	1994-1995	17	22
8	1995-1996	21	26
9	1996-1997	12	19
10	1997-1998	13	21
Total		190	217

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Berdasar tabel 7 jumlah pendatang Kelurahan Jember Lor untuk laki-laki

jumlah terbanyak pendatang pada tahun 1988 sampai 1989 angka pendatang terendah tahun 1996 sampai 1997; untuk pendatang perempuan jumlah pendatang terbanyak tahun 1993 sampai 1994 dan yang terendah pada tahun 1992 - 1993.

Tabel 8: Jumlah Kematian Di Kelurahan Jember Lor Tahun 1988-198

No	Tahun	Kematian	
		Laki-laki	Perempuan
1	1988-1989	9	4
2	1989-1990	2	4
3	1990-1991	5	6
4	1991-1992	0	4
5	1992-1993	4	0
6	1993-1994	5	11
7	1994-1995	7	2
8	1995-1996	11	0
9	1996-1997	5	2
10	1997-1998	13	3
Total		61	36

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Tabel 9: Jumlah Penduduk yang Pergi di Kelurahan Jember Lor

No	Tahun	Jumlah yang Pergi	
		Laki-Laki Frekuensi (f)	Perempuan Frekuensi (f)
1	1988-1989	12	17
2	1989-1990	2	9
3	1990-1991	0	3
4	1991-1992	1	2
5	1992-1993	3	0
6	1993-1994	4	1
7	1994-1995	0	5
8	1995-1996	2	2
9	1996-1997	4	0
10	1997-1998	0	1
Total		28	30

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Kedatangan penduduk baru memang tidak dapat dicegah, mengingat

kelurahan tersebut ini letaknya paling dengan pusat kota sehingga paling tetap untuk tempat tinggal. Sampai saat ini jumlah penduduk yang datang angkanya lebih besar dibandingkan dengan dengan jumlah penduduk yang pergi karena daya tarik daerah sekitar yang dekat dengan pusat kota peluang kerja yang lebih memadai serta mudahnya untuk mendapatkan beberapa kebutuhan hidup mereka.

Angka yang juga memegang peranan penting pada penambahan jumlah penduduk adalah angka kelahiran yang jika dilihat adalah lebih besar dari jumlah angka kematian. Kalaupun Keluarga Berencana sudah lama dikenal masyarakat, namun program ini rupanya belum begitu berhasil menekan penambahan penduduk. Tetapi hal tersebut juga disebabkan oleh faktor kesehatan yang baik, gisi yang cukup telah berhasil menekan angka kematian baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa.

2.2.2 Mata Pencaharian

Tabel tentang mata pencaharian memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja dibidang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 48,4%, disusul kemudian sebagai Pedagang (13,1%), yang bekerja sebagai pensiunan dan swasta (23,2%), yang bekerja dibidang pertanian yaitu tani dan buruh tani (9,6%), mereka yang bekerja sebagai ABRI dan sisa lainnya (5,7%).

Tabel 10: Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Jember Lor

No	Jenis Mata Pencaharian	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Petani	409	4
2	Buruh tani	568	5,6
3	Pegawai Negeri Sipil	4930	48,4
4	ABRI	205	2
5	Swasta	1147	11,3
6	Pensiunan	1211	11,9
7	Pedagang	1336	13,1
8	Lain-lain	377	3,7
Jumlah		10183	100

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Mereka yang bekerja dibidang pertanian terdiri dari petani dan buruh tani.

Yang termasuk petani adalah orang yang memiliki tanah garap pertanian dan menggarapnya. Sedangkan buruh tani adalah buruh untuk macul yaitu menggarap tanah pertanian milik petani pemilik. Dibandingkan dengan petani, buruh tani inilah yang tidak menentu penghasilannya karena itu biasanya mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sejauh mereka mampu.

Menurut pandangan penduduk Kelurahan Jember Lor pekerjaan yang paling dianggap ideal adalah pegawai negeri yang mempunyai penghasilan tetap. Disamping mempunyai penghasilan tetap mereka juga bisa melakukan pekerjaan sambilan lainnya, misal dengan bertani ataupun pekerjaan wiraswasta. Dengan demikian masyarakat kelurahan menganggap bahwa pegawai negeri sipil mempunyai dua sumber penghasilan atau nafkah, yaitu gaji sebagai pegawai negeri dan dan hasil dari bersawah atau berwiraswasta. Oleh karenanya hal tersebut pada umumnya kehidupannya bercukupan. Adapun pekerjaan yang dianggap rendah adalah buruh sebab buruh adalah orang yang tidak mempunyai tanah garapan ataupun sumber penghasilan lainnya, walaupun punya tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 11: Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase(%)
1	Tidak Sekolah	208	3,3
2	Tidak Tamat SD	341	5,5
3	Belum Tamat SD	169	2,7
4	Tamat SD	1.428	23
5	Tamat SMP	2.113	34
6	Tamat SMA	1.469	23,6
7	Perguruan Tinggi	492	8
Total		6220	100

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998

Mengenai keadaan pendidikan di Kelurahan Jember Lor boleh dikatakan baik walaupun penduduk yang tingkat pendidikannya hanya sampai di Sekolah Menengah Pertama prosentasenya cukup besar (34%), dengan jumlah pendidikan Sekolah Dasar yang tidak tamat sebesar (5,5%), belum tamat Sekolah Dasar sebesar (2,7%), Tamat SD sebesar (23%), tamat SMA sebesar (23,6%), dan yang

sampai perguruan tinggi adalah (8%).

Kalau kita bandingkan dengan keadaan pendidikan di kelurahan pada umumnya, keadaan di Kelurahan Jember Lor ini sudah cukup baik, mengingat sebagian besar penduduknya telah mengenal pendidikan formal. Apabila pandangan masyarakat Kelurahan Jember Lor sekarang ini sudah positif dan malu jika anaknya tidak bisa mengenyam pendidikan formal, dan diperkirakan nantinya jumlah masyarakat yang tidak mengenal sekolah akan semakin berkurang.

Angka yang ada sebesar 208 jiwa (3,3%) pada golongan yang tidak sekolah pada tabel 6 harus kita tafsirkan sevara hati-hati. Mereka yang termasuk kategori tidak sekolah ini kemungkinan besar adalah orang-orang tua yang dahulu tidak mengenal pendidikan formal sama sekali. Meskipun demikian hal ini tidak berarti buta huruf sebab sekarang ini disini sudah dikenal kelompok-kelompok belajar yang banyak diikuti oleh orang-orang tua.

Berdasarkan pengamatan ini kita bisa mengharapkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Jember Lor tidak lama lagi akan mencapai taraf yang cukup tinggi. Apalagi sarana pendidikan disana sudah cukup baik. Walaupun sarana pendidikan di Kelurahan Jember Lor hanya ada pendidikan Taman Kanak-Kanak sebuah Sekolah Dasar Negeri dan sebuah Sekolah Dasar Inpres, tetapi sekolah lanjutan yang lain letaknya tidak jauh dan mudah ditempuh sarana angkutan umum.

2.2.3 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk dalam uraian ini ada dua macam, yakni migrasi permanen dan non-permanen. Migrasi permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap disuatu tempat seperti transmigrasi dan urbanisasi, sedang non-permanen adalah perpindahan penduduk ke tempat lain yang bersifat sementara seperti misalnya nglaju dan migrasi musiman. Pada sepuluh tahun terakhir ada 32 KK yang pindah tempat tinggal kedaerah lainnya dan menetap didaerah baru tersebut. Alasan mereka pindah tempat berfariasi ada karena alasan pindah tempat kerja atau juga mengikuti keluarga.

Di Kelurahan Jember Lor mobilitas penduduk cukup tinggi, banyak penduduk yang nglaju untuk kepentingan tertentu. Mobilitas ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pekerjaan. Dari sekian banyaknya nglaju, kita dapat mengelompokkan menjadi 4, yaitu untuk bekerja, sekolah, berdagang, dan berkunjung. Dari 4 kelompok tujuan tersebut lebih dari 90% yang bertujuan bekerja, berdagang dan bersekolah sedangkan yang bertujuan berkunjung adalah kurang dari 10%.

Nglaju untuk kepentingan berkunjung frekuensinya sangat dipengaruhi oleh musim seperti pada hari raya. Pada bulan syawal banyak penduduk berkunjung ke sanak keluarga keluar daerah dan pergi ke makam leluhur, sedangkan pada bulan lain frekuensi kunjungan menurun. Umumnya para penglaju menggunakan kendaraan sepeda motor ataupun mobil pribadi selebihnya menggunakan sarana transportasi angkutan umum. Penduduk yang setiap harinya nglaju, yaitu yang berangkat pagi hari dan pulang pada siang atau sore hari. Jumlah penglaju di Kelurahan Krajan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dusun-dusun lainnya. Sebagian dari mereka pergi keluar kecamatan atau bahkan ke kota terdekat seperti Bondowoso ataupun Lumajang relatif rendah tapi mereka lebih banyak pergi kedaerah yang lebih jauh ataupun kondisi kota yang lebih besar seperti Surabaya atau Malang. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pegawai negeri dan ABRI yang nglaju keluar kecamatan dan kabupaten sebesar 5682 jiwa.

2.3.4 Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial tampak cukup jelas di Kelurahan Jember Lor dengan kekayaan sebagai faktor penentunya. Dengan kekayaan itulah mereka menjadi terkenal di lingkungannya. Dibawah ini akan kami beri contoh-contoh tentang bentuk pelapisan sosial yang ada di tempat penelitian. Pembagian kelas disini tampak dalam berbagai kegiatan, terutama dalam jumlah sumbangan yang diberikan. Apabila kelurahan akan menyelenggarakan perayaan-perayaan misalnya perayaan tujuh belasan maka biaya yang ditanggungkan oleh seluruh warga. Maksudnya masing-masing diminta sumbangan untuk biaya penyelenggaraan, dengan jumlah yang berbeda. Bagi warga yang termasuk kelas

pertama harus memberi sumbangan sebesar Rp 10.000,00 kemudian kelas kedua sebesar Rp 5000,00 dan selanjutnya kelas terakhir Rp 2.500,00. Disini yang berhak menentukan pembagian kelas adalah kepala desa. Menurut kepala desa pembagian kelas ini mendapat tanggapan positif dari warga dan telah berlangsung secara turun-menurun. Selain itu tidak tertutup kemungkinan karena adanya prektise, ada sejumlah warga yang menyumbang diluar kelas atau kemampuannya, misal kelas kedua memberikan sumbangan sebesar kemampuan kelas pertama dan kelas ketiga bisa memberikan sumbangan sebesar kemampuan kelas kedua ataupun kelas pertama.

Bentuk pelapisan sosial yang lain juga terjadi karena alasan usia atau tingkat senioritas, yaitu golongan tetua (orang tua) dan golongan muda-mudi. Mereka yang termasuk tetua adalah perangkat desa, dan mereka yang dianggap oleh masyarakat mengetahui seluk-beluk adat istiadat setempat. Yang juga termasuk di dalamnya adalah orang yang dianggap berilmu atau tingkat pendidikan diatas mereka yang ada pada umumnya sehingga disegani oleh masyarakat setempat. Mereka mempunyai hak untuk dimintai pertolongan untuk menimbang suatu keputusan, selain itu mereka menjadi tempat bertanya (memberi nasehat atau masukan) bagi warga desa seperti misalnya masukan dalam hal orientasi pembangunan desa kedepan demi kemajuan desa tersebut mendirikan rumah, memberi nama anak yang baru lahir dan sebagainya.

Golongan muda-mudi mempunyai peranan penting sendiri, yang pada umumnya tugas mereka sangatlah kompleks. Misalnya ada warga yang mempunyai hajat atau tertimpa musibah, golongan ini menjadi tempat untuk orang meminta bantuan tenaga jika diperlukan. Meskipun pelapisan sosial ini disini tampak cukup jelas, namun hubungan antar individu dari lapisan sosial yang berbeda tetap berjalan dengan baik, contohnya dapat dilihat dalam kegotong-royongan atau kebersamaan mereka dalam berbagai aktivitas sosial, seperti misalnya kematian. Bilamana keluarga dari si mati adalah orang yang tidak punya maka segala beban tanggung jawab oleh seluruh warga yang dimotori oleh kaum muda-mudinya. Di kelurahan ini juga ada uang iuran kematian, dan uang tersebutlah yang digunakan

untuk menanggung biaya penguburan sampai pada berakhirnya prosesi pemakaman.

2.3 Latar Belakang Sosial Budaya

2.3.1 Sejarah Desa

Pada awal tahun 1961 Pemerintah Daerah Tingkat II Jember mengadakan penataan pemerintahan desa. Desa-desa yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi kesatuan yang lebih berpotensi dihapuskan, dipecah dan disatukan dengan desa lain. Dalam hal ini Kelurahan Jember Lor merupakan salah satu bentuk nama baru yang sebelumnya jadi satu dengan Kelurahan Patrang.

Pada awalnya Kelurahan Jember Lor kebanyakan para pendatang yang sebagian besar adalah penduduk yang datang dari Pulau Madura dan daerah Jawa Tengah yang dipekerjakan diperusahaan-perusahaan pemerintah Belanda di P. Jawa. Menurut keterangan para sesepuh daerah setempat yaitu Pak Sudjak, Kelurahan Jember Lor yang letaknya hampir dipusat kota biar mudah dalam pemberian batas dengan pusat kota dan mudah diingat yang disesuaikan dengan bahasa jawa campur madura untuk daerah barat dan timur pusat kota bupati waktu itu langsung menyebut dengan istilah Jember Lor dan Jember Kidul, hingga menjadi kebiasaan dan dijadikan nama kelurahan.

2.3.2 Administrasi Desa

Perubahan administrasi desa yang terjadi di kelurahan Jember Lor sejalan dengan perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahun 1965 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tentang Desa Praja. Disini desa atau kelurahan dimaksudkan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pada tahun 1969 keluar Undang-Undang yang yang menyetakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965. Keluarnya Undang-Undang ini dalam rangkla meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa dengan menjadikan desa sebagai daerah

otonomi.

Untuk merealisasikan rencana tersebut maka pada tahun 1974 keluar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pembangunan Desa. Undang-Undang tersebut guna mewujudkan program yang komperhensif dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih jelas tegas dan terkoordinasi yang dikenal dengan sistem Unit daerah Kerja Pembangunan yang dipusatkan ditingkat kecamatan. Dengan demikian pemerintahan Kelurahan Jember Lor telah berkali-kali mengalami perubahan struktur organisasi.

2.3.3 Kegiatan Sosial

Dalam kehidupannya, penduduk melakukan berbagai aktivitas dan interaksi diantara mereka, yang dikaitkan dengan usaha menjaga ikatan kelompok dan ketentraman hidup. Selamatan merupakan kegiatan sosial penduduk yang mewarnai sejarah kehidupan untuk memenuhi usaha-usaha tersebut. Tidak dapat disangkal, selamatan berasal dari kata selamat yang berarti tentram, lepas dari ancaman tertentu, lebih mengarah pada usaha menyelaraskan diri mengadakan perdamaian dengan alam dan lingkungannya yang dianggap sebagai sebagai cirikhas desa.

Kegiatan sosial ini yang dapat ditemui di Kelurahan Jember Lor adalah membantu penduduk lain jika sedang mendirikan rumah dan pada saat tetangga sedang mempunyai hajat. Disamping mampu menjaga ikatan sosial, bentuk kegiatan sosial yang ada di kelurahan ini merupakan suatu bentuk tolong menolong dalam masyarakat yang secara sosial menuntun penduduk untuk ikut serta didalamnya, tetapi dengan perhitungan-perhitungan ekonomi tertentu, yang memang harus dilakukan. Dengan kata lain dalam kegiatan sosial tersebut penduduk berkesempatan memperkuat ikatan sosialnya. Bertambah eratnya ikatan sosial ini sejalan dengan harapan penduduk akan bantuan para tetangga ketika dia membangun rumah atau sedang mempunyai hajat.

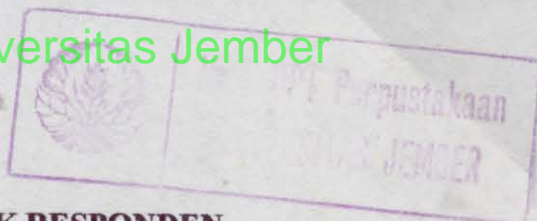
2.3.4 Sistem Kepercayaan

Seperti tampak pada Tabel 12 mayoritas penduduk Kelurahan Jember Lor (91,5%) adalah pemeluk agama Islam sedangkan pemeluk agama lainnya adalah minoritas. Dengan kondisi seperti ini maka norma-norma agama Islam berpengaruh cukup kuat pada pandangan hidup dan perilaku penduduk kelurahan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya organisasi keagamaan seperti jamaah Tahlil, jamaah Diba', Manaqih dan lain-lainnya. Sedangkan hubungan antar pemeluk agama yang ada di kelurahan tersebut pada umumnya setiap penduduk menjaga atau menghindari konflik antar agama. Hal ini tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 12: Jumlah Penduduk menurut Agama

No	Agama	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	Islam	17.762	91,5
2	Kristen	765	3,9
3	Katolik	728	3,7
4	Budha	72	0,4
5	Hindu	86	0,5
Total		19.431	100

Sumber: Monografi Kelurahan Jember Lor Th 1998



III. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Responden sebagai orang yang penting dalam suatu penelitian memiliki karakteristik tersendiri yang tercermin pada latar belakang kehidupan responden. Latar belakang tersebut mencakup umur; pendidikan; jumlah anak; jenis pekerjaan; pendapatan dan seterusnya dapat diperlihatkan gambaran umum dari ibu rumah tangga yang diteliti dan dapat dipergunakan untuk menjelaskan bagian-bagian analisis selanjutnya.

3.1 Alamat Responden

Seperti yang penulis jelaskan pada bab I, bahwa sesuai dengan pengambilan sampel yang proporsional Kelurahan Jember Lor kami bagi menjadi tiga (3 bagian yang meliputi Kelurahan Jember Lor bagian Utara, bagian Selatan dan bagian Timur. Untuk mengetahui alamat responden yang berjumlah 50 orang, penulis sajikan dalam bentuk data sebagai berikut:

Tabel 13: Alamat Responden

No	Wilayah	Frekuensi	Prosentase
1	Utara	18	36
2	Selatan	17	34
3	Timur	15	30
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer tahun 2000

Mengenai banyak responden yang diambil dari masing-masing wilayah tersebut, penulis menggunakan metode proporsional random sampling. Hal ini karena yang menjadi responden adalah seluruh tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Jember Lor, sedangkan penduduk tersebut tinggal menyebar diseluruh kelurahan tersebut.

Dari tabel tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden banyak dari Kelurahan Jember Lor wilayah Utara yang berjumlah 18 orang, kemudian dari wilayah Selatan yang jumlahnya 17 orang dan dari wilayah Timur hanya 15 orang.

3.2 Umur

Di keseluruhan Tokoh Masyarakat yang menjadi responden penelitian ini terlihat bahwa umumnya mereka bervariasi seperti tampak pada tabel 14 dibawah ini:

Tabel 14: Komposisi Umur Tokoh Masyarakat

No	Umur			Jumlah	%
1	20	-	29 tahun	14	28
2	30	-	39 tahun	27	54
3	40	-	keatas	9	18
Jumlah				50	100

Sumber: Data primer tahun 2000

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa hampir seluruh Tokoh Masyarakat kelurahan tersebut yang diteliti dalam penelitian ini terbanyak adalah dari golongan usia 30 - 39 tahun, yakni sebesar 27 orang atau 54%. Pada usia produktif ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kegiatan atau aktifitas seperti kegiatan pembangunan untuk berpartisipasi dalam lingkungan sedangkan mereka yang tergolong kurang dan tidak produktif sebesar 46%; 28% untuk komposisi umur 20 - 29 tahun dan 18% untuk komposisi umur 40 keatas.

3.3 Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud penulis dalam pembahasan ini adalah sebagaimana pendapat Siagian (1983:57) sebagai berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang berlangsung seumur hidup dalam pengtransformasian pengetahuan oleh seseorang kepada orang lain. Adapun yang dimaksud penulis adalah pendidikan formal yakni pendidikan yang ditempuh sejak TK sampai PT. Dari data yang terkumpul juga menunjuk data pendidikan Tokoh Masyarakat yang bervariasi untuk lebih jelasnya lihat tabel 15 berikut ini:

Tabel 15: Komposisi Pendidikan Tokoh Masyarakat

No	Umur	Jumlah	%
1	Rendah (SD / Tidak Sekolah)	6	12
2	Sedang (SLTP / Sederajat)	32	64
3	Tinggi (PT/SLTA/Sederajat)	12	24
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer tahun 2000

Berdasarkan tabel 15 tersebut diatas terlihat bahwa Tokoh Masyarakat yang diambil sebagai responden yang memiliki pendidikan rendah 12%, yakni mereka yang berpendidikan sekolah dasar (SD), mereka yang memiliki pendidikan sedang 64%, yakni mereka yang berpendidikan antara sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas dan yang berpendidikan tinggi 24% yaitu yang berpendidikan di perguruan tinggi. Seseorang yang berpendidikan rendah pada umumnya memiliki pengetahuan sedikit sekali tentang dunia luar, sehingga adanya kegiatan kumpul-kumpul semacam rapat lingkungan ataupun kegiatan pembangunan lainnya yang hubungannya dengan lingkungan sekitar, mereka biasanya mempunyai keinginan untuk hadir karena dipandang sebagai media informasi melalui pertemuan-pertemuan tersebut misalnya peserta tokoh masyarakat diberi pengetahuan .

3.4 Status Perkawinan

Karena yang menjadi responden adalah kepala keluarga maka tentunya mereka yang sudah kawin atau paling tidak sudah pernah menikah. Hal ini dapat diketahui pada tabel 15 berikut ini.

Tabel 16: Komposisi Status Perkawinan Responden

No	Status Perkawinan	Frekwensi	%
1	Kawin	36	72
2	Duda	14	28
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2000

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah responden yang sudah kawin berjumlah 36 orang atau 72% dan yang duda 14 orang atau 28%; dari hal tersebut bisa kita gambarkan bahwa berpengaruh dengan kondisi masih ada istri

tentunya mereka lebih banyak waktunya untuk keluarga dibandingkan mereka yang sudah duda tentunya mereka mempunyai waktu luang yang banyak.

Sedangkan mengenai jumlah anak, disini yang diteliti adalah jumlah anak yang masih tinggal dan menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan data yang telah terkumpul menunjukkan anak yang masih tinggal dan menjadi tanggungan ayah yang berkisar antara satu sampai tiga orang anak, untuk lebih jelasnya mengenai anak yang menjadi tanggungan ayah dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 17: Komposisi Jumlah Anak yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga

No	Jumlah anak yang menjadi tanggungan	Frekuensi	%
1	Sedikit (1 - 3 orang)	17	34
2	Cukup (4 - 6 orang)	21	42
3	Banyak (7 orang keatas)	12	24
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer tahun 2000

Dari tabel diatas, terlihat kepala keluarga yang memiliki sedikit anak ada 34%, sedangkan kepala keluarga yang mempunyai cukup anak ada 42%, dan kepala keluarga yang mempunyai banyak anak ada 24%. Kepala Keluarga yang mempunyai sedikit anak ada 17 orang, hal ini tentunya waktu luang kepala keluarga itu banyak, sehingga memungkinkan kepala keluarga itu hadir dalam kegiatan.

Adanya anggota keluarga lain dalam suatu rumah tangga juga mempengaruhi kegiatan seorang kepala keluarga diluar rumah. Yang dimaksud anggota keluarga lain adalah anggota keluarga diluar keluarga inti (ayah, ibu, dan anak yang belum menikah), seperti mertua orang tua dari suami atau istri, keponakan, adik, anak yang sudah menikah, cucu dan anggota keluarga lainnya yang masih mempunyai hubungan darah dengan kata lain Ekstended Family.

Untuk mengetahui ada keluarga lain dalam keluarga ayah yang mempunyai responden dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 18: Komposisi ada tidaknya anggota keluarga lain

No	Ada tidaknya anggota keluarga lain	Frekuensi	%
1	Ada	11	22
2	Tidak ada	39	78
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer tahun 2000

Dari tabel tersebut diatas; terlihat bahwa dari 50 oarang responden yang diteliti ada 18% orang diantaranya termasuk keluarga extended. Dan dari 11 keluarga ini terdapat 7 orang kepala keluarga yang masih tinggal bersama anak atau adiknya yang telah menikah, dengan kata lain dalam satu keluarga terdiri dari lebih satu keluarga (extended). Hal ini tentu saja mempengaruhi kegiatan kepala keluarga diluar rumah, karena dengan adanya keluarga lain dalam satu rumah memungkinkan pekerjaan kepala keluarga tersebut bisa digantikan dengan anggota keluarga yang lain. Mengenai jumlah anggota keluarga lain yang tinggal bersama kepala keluarga yang diteliti dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini.

Tabel 19: Komposisi Anggota Keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah

No	Anggota Keluarga yang mempunyai hubungan darah	Frekuensi	%
1	Nenek	5	45
2	Mertua	-	0
3	Keponakan	3	27
4	Anak yang telah menikah	2	19
5	Adik yang telah menikah	1	0,9
Jumlah		11	100

Sumber: Data primer tahun 2000

Disamping anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dengan responden, ada anggota keluarga yang tidak mempunyai hubungan darah dengan kepala keluarga diluar rumah yaitu adanya pembantu rumah tangga. Dengan adanya pembantu rumah tangga memungkinkan kepala keluarga tersebut melakukan kegiatan diluar rumah, seperti misal kegiatan lingkungan, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 20: Komposisi Ada tidaknya anggota keluarga lain yang tidak mempunyai hubungan darah

No	Anggota Keluarga Lain	Frekuensi	%
1	Ada	39	78
2	Tidak ada	11	22
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer tahun 2000

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada 22% responden yang tidak mempunyai anggota keluarga lain yang tidak mempunyai hubungan darah (pembantu rumah tangga) dan ada 78% yang mempunyai pembantu rumah tangga. Dengan adanya pembantu rumah tangga ini memungkinkan kepala rumah tangga dapat melakukan aktifitasnya diluar rumah misalnya mengikuti kegiatan lingkungan.

Untuk mencakup kebutuhan hidup dikota seperti Jember ini tentunya berbeda dengan apabila hidup di dusun (dusun yang lebih kecil). Biaya hidup yang dibutuhkan juga lebih banyak, misal biaya pendidikan yang lebih mahal, belum lagi biaya untuk rekreasi (karena masyarakat kota biasanya membutuhkan rekreasi untuk melepaskan kejenuhan dari kesibukan sehari-hari) dan sebagainya.

Karena kebutuhan hidup dikota semakin banyak itulah, maka besar kecilnya pendapatan keluarga ini merupakan salah satu pertimbangan bagi kepala keluarga dalam mengambil keputusan; apakah ayah(suami) tersebut aktif dalam bidang ekonomi (bekerja) atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Dari 50 orang kepala keluarga yang diteliti terdapat 42 orang yang aktif dalam bidang ekonomi (bekerja). Dari 38 orang kepala keluarga yang bekerja ketika ditanya 8 orang diantaranya alasan mereka bekerja adalah menginginkan membantu meringankan beban keluarga, untuk mendapatkan uang tambahan karena gaji atau pendapatan keluarga kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga ada 12 orang, 8 orang karena tidak ingin pendidikannya yang selama ini ia peroleh akan sia-sia, 10 orang memberikan alasan dia bekerja daripada menganggur atau suka bekerja(untuk mengisi waktu luang, jelasnya alasan kepala keluarga ada pada tabel 21 berikut

Tabel 21: Komposisi Alasan kepala keluarga bekerja diluar rumah

No	Alasan bekerja diluar rumah	Frekuensi	%
1	Meringankan beban keluarga	12	31
2	Karena gaji atau pendapatan keluarga kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga	12	31
3	Untuk mendapatkan uang tambahan	10	26
4	Saya suka bekerja	8	21
5	Agar pendidikan yang saya terima tidak sia-sia	8	21
Jumlah		38	100

Sumber: Data primer tahun 2000

Keadaan kota dimana tersedia sarana pendidikan yang lebih lengkap, memungkinkan bagi kepala keluarga untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang diinginkan setelah mereka memperoleh kesempatan untuk bersekolah, mereka ingin mempergunakan pengetahuan secara produktif atau dengan kata lain mereka ikut serta dalam sistim ekonomi masyarakat luas. Dari tabel 21 terlihat orang kepala keluarga yang bekerja dengan alasan karena tidak ingin pendidikannya sia-sia. Disamping itu, kehidupan masyarakat kota dimana masyarakatnya dituntut untuk lebih dinamis agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau masyarakat sekitarnya dan mendorong kepala keluarga untuk aktif dalam masyarakat, salah satunya adalah bekerja. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian kaum laki-laki tidak puas lagi dengan peranannya mengandalkan satu mata pencaharian (sumber pendapatan) saja. Kenyataan ini dapat dilihat juga pada tabel 21, dimana 8 orang kepala keluarga bekerja dengan alasan karena menyukai bekerja.

Jenis pekerjaan kepala keluarga beragam pula ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, ABRI, Pedagang, Wiraswasta dan lain-lain. Beragam jenis pekerjaan kepala keluarga ini juga memungkinkan karena adanya kesempatan yang sama dengan orang lain dalam hal menempuh pendidikan dan memiliki pekerjaan. Mengenai jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 22

Tabel 22: Komposisi Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	36
2	Pegawai Swasta	10	20
3	Pedagang	10	20
4	Wiraswasta	5	10
5	ABRI	3	6
6	Lain-lain (pensiunan)	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer tahun 2000

Dengan beragamnya jenis pekerjaan kepala keluarga tersebut rata-rata jam kerja mereka pun beragam pula. Untuk pegawai negeri, Swasta rata-rata jam kerja mereka sekitar 7-9 jam. Hal ini tentunya berpengaruh pada aktifitas kepala keluarga, apabila jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja mereka cukup jauh yang tentunya memerlukan waktu yang lama untuk menempuh perjalanan.

Dengan demikian waktu mereka tersisa cukup banyak. Apabila mereka adalah seorang kepala keluarga yang aktif di lingkungannya tentunya tidak lepas dari tugasnya. Melihat kesibukan yang demikian itu tentunya mereka akan berfikir panjang jika harus mengikuti kegiatan diluar rumah. Kalaupun kegiatan itu diadakan pada waktu hari libur, mereka juga berfikir, karena pada waktu hari libur merupakan waktu yang sangat berharga buat mereka untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga setelah hari-hari biasa, waktu yang tersisa oleh kesibukan kerja. Bagi kepala keluarga yang bekerja sebagai wiraswasta apabila dirumah tentunya akan lebih memungkinkan mereka tidak terikat oleh peraturan, dan pekerjaan mereka. Dalam penelitian ini, ada 5 orang yang bekerja sebagai wiraswasta, dan 28 kepala keluarga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Swasta. Mengenai jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja kepala keluarga dapat dilihat pada tabel 23 berikut ini

Tabel 23: Komposisi jarak tempat kerja dengan tempat tinggal

No	Jarak (km)	Frekuensi	%
1	0,5 - 4	27	58
2	5 - 9	8	17
3	10 lebih	12	25
Jumlah		47	100

Sumber: Data primer 2000

Dengan jarak yang beragam tersebut, ada yang mereka tempuh dengan jalan kaki, naik kendaraan pribadi, kendaraan umum, maupun kendaraan jemputan. Bagi yang tempat tinggalnya jauh dari tempat bekerja, menggunakan kendaraan umum, tentunya membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada mereka yang naik kendaraan-kendaraan pribadi maupun jemputan karena mereka yang naik kendaraan umum membutuhkan waktu untuk menghadang kendaraan, belum lagi jika menunggu penumpang, selain menyita waktu juga tenaga. Selain itu sesampai ditempat kerja, mereka harus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Tentunya mereka lelah sekali sesampai dirumah. Hal ini akan mempengaruhi aktifitas mereka yang lain diluar rumah misalnya kegiatan yang ada dilingkungan mereka.

Mengenai berapa lama kepala keluarga bekerja, bisa dilihat pada tabel 24

Tabel 24: Komposisi lama bekerja kepala keluarga

No	Lama bekerja (th)	Frekuensi	%
1	1-5	8	17
2	6-11	12	25
3	12 lebih	27	58
Jumlah		47	100

Sumber: Data Primer tahun 2000

3.5 Tingkat Pendapatan Responden

Pendapatan secara umum diartikan sebagai penerimaan baik berupauang maupun barang dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pendapatan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu pendapatan pokok dan pendapatan sampingan.

Lama tidaknya kepala keluarga bekerja bisa berpengaruh pada pendapatannya.

Pendapatan ini didasarkan pendapatan terendah Rp 75.000 dan tertinggi Rp 750.000 sehingga dapat dikriteriakan .

Pendapatan terendah	:75.000 - 350.000
Pendapatan sedang	: 350.050 - 500.000
Pendapatan tertinggi	: 500.050 - 750.000

Selanjutnya mengenai pendapatan keluarga dari responden yang diteliti seperti dilihat pada tabel 25 berikut ini:

Tabel 25: Komposisi pendapatan keluarga

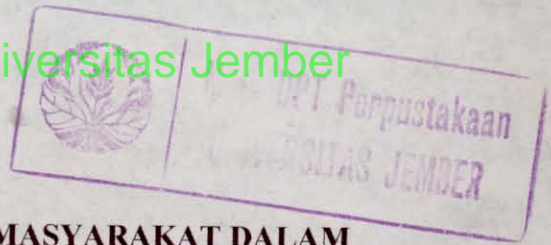
No	Jumlah pendapatan	Frekuensi	%
1	Rendah	8	16
2	Sedang	32	64
3	Tinggi	10	20
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer tahun 2000

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa responden yang termasuk pendapatan keluarganya rendah ada 16%, pendapatan sedang ada 64% dan pendapatan tinggi ada 20%

Dengan beragamnya pendapatan keluarga tersebut bukan berarti bahwa kenyataan yang sebenarnya, maksudnya apabila pendapatan keluarga itu kurang dari 250.000 dapat dikatakan rendah dan apabila pendapatan keluarga itu lebih dari 500.000 maka dapat dikatakan tinggi, karena tinggi rendahnya pendapatan masing-masing keluarga adalah relatif. Apalagi bila dikaitkan dengan kebutuhan hidup masing-masing keluarga di Jember.

Untuk kepala keluarga yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, bukannya kepala keluarga tersebut tidak mempunyai kesibukan seperti kepala keluarga yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja).



IV. PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Untuk melihat partisipasi tokoh masyarakat dalam meningkatkan solidaritas sosial dalam pembangunan lingkungan, dapat kita lihat dari upaya-upaya yang ditelorkan oleh tokoh masyarakat tersebut, dari pemberian informasi perencanaan pembangunan, dorongan tokoh masyarakat terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, penyuluhan atau informasi akan manfaat hasil pembangunan sampai pada pemanfaatan hasil pembangunan itu sendiri.

1. Penyertaan Tokoh Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Demokrasi di daerah pedesaan harus dipertahankan dan dikembangkan kalau kita tidak ingin melihat menumpuknya keresahan dan ketegangan sosial yang bisa berakibat dengan protes atau pemberontakan. Pengembangan demokrasi desa berarti penyaluran aspirasi penduduk desa yang berarti juga pengembangan partisipasi warga desa.

Pemberian informasi masalah perencanaan pembangunan dan penyertaan tokoh masyarakat beserta masyarakat setempat didalam proses perencanaan pembangunan pada hakekatnya juga merupakan suatu demokrasi. Dimana pada kondisi tersebut tokoh masyarakat beserta masyarakat setempat diharapkan dapat ikut menjadi subyek tidak hanya sebagai obyek.

Tokoh Masyarakat melibatkan masyarakat didalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan upaya tokoh tersebut untuk mengorganisir didalam pembangunan selain informasi yang diberikan . Hal ini dengan tujuan agar masyarakat juga ikut memiliki proyek pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Memang dengan cara seperti ini pembangunan terkesan agak lamban pelaksanaannya, namun keuntungan yang didapat adalah kelangsungan dari proyek itu sendiri dapat terjamin, hal ini karena masyarakat yang menjadi pelaksana pembangunan dengan sendirinya juga memiliki tanggung jawab keberhasilan pembangunan desanya.

Berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam artian pembangunan fasilitas tersebut dibangun oleh pemerintah dengan anggaran pemerintah daerah pula. Segi positifnya hasilnya dapat langsung tampak dan tidak memakan waktu lama serta tersedianya modal yang cukup. Namun segi negatifnya menyangkut kelangsungan dari proyek itu sendiri kurang dapat terjamin, hal ini karena masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan tanpa dilibatkan sama sekali.

Kemudian pemberian informasi penyertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan yang diupayakan oleh Tokoh Masyarakat desa tersebut, dilakukan setiap dimulainya penyusunan program pembangunan setiap tahun dan tiap direncanakan suatu pembangunan yang setiap tahun tidak sama volumenya, tergantung pada banyaknya program pembangunan yang direncanakan.

Adapun volume tingkat kehadiran rapat yang dilakukan Tokoh Masyarakat pada periode tahun 1999/2000 sebanyak (8) kali dimana tokoh masyarakat desa melibatkan secara langsung masyarakat setempat.

Untuk melihat partisipasi tokoh masyarakat yang diukur dari tingkat penyertaan masyarakat dalam proses rapat perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 26; Penyertaan Tokoh Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Aktif	31	62
2	Kurang Aktif	12	24
3	Tidak Aktif	7	14
Jumlah		50	100

Sumber data: Hasil Penelitian sampai Nov. 2000

Dari tabel tersebut diatas, dapat kita lihat terdapat 31 responden atau sekitar 62% yang berada pada kategori aktif. Disini berarti 31 responden tersebut aktif dalam proses perencanaan pembangunan serta telah memberikan ide-idenya pada proses perencanaan.

Hal itu karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Pendidikan; Dari 31 responden tersebut yang berada pada kategori sering, bahwa tokoh masyarakat aktif mengikuti dalam proses perencanaan pembangunan, semuanya memiliki tingkat pendidikan yang cukup, yaitu pendidikan menengah keatas. Hal ini yang membuat mereka dapat merespon untuk terlibat didalamnya, selain itu responden memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menyerap informasi manfaat akan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu mereka mampu menyampaikan ide-ide pembangunan yang sangat bermanfaat guna kelangsungan proses pelaksanaan pembangunan.
- b. Faktor Pendapatan; 31 responden tersebut berada pada kategori pendapatan yang tinggi dan sedang. Dengan keadaan tersebut maka sangat memungkinkan bagi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan program pembangunan. Hal ini karena sebagian besar waktu mereka tidak habis dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga tokoh masyarakat bisa aktif.

Sedangkan sebanyak 12 responden atau sekitar 24% berada pada kategori kurang aktif. Disini berarti 12 responden tersebut kurang aktif didalam proses perencanaan pembangunan dan mereka hanya menghadiri didalamnya serta jarangpula mereka menyampaikan ide-ide pembangunan.

Kemudian terdapat 7 (tujuh) responden atau sekitar 14% berada pada kategori tidak pernah aktif didalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini berarti mereka tidak menghadiri ataupun merespon positif ataupun menyampaikan ide-ide pembangunan walaupun mereka diikutsertakan didalam proses perencanaannya.

Adapun faktor yang menyebabkan keengganan tokoh menyertakan masyarakat didalam proses perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pendidikan; Mereka rata-rata hanya memiliki pendidikan rendah. Keadaan demikian ini yang menyebabkan responden mempunyai persepsi negatif tentang pentingnya penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya pertemuan tersebut hanya membicarakan kapan pelaksanaannya yang menurut mereka cukup dibicarakan beberapa orang saja atau pembangunan apa yang perlu menjadi prioritas utama atau didahulukan sedangkan responden hanya puas dengan kondisi apa adanya. Hal ini semua disebabkan pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas.
- b. Faktor Pendapatan; Pendapatan responden yang masih rendah sehingga berakibat pada kesempatan yang dimiliki. Kalau dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah sulit, mana mungkin dia menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat ataupun terlibat untuk ikut serta dan membahas tentang perencanaan pembangunan.

2. Penyertaan Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Sama seperti indikator pertama bagaimana dorongan yang sifatnya berupa keikutsertaan tokoh masyarakat setempat untuk ikut serta didalam pelaksanaan pembangunan secara langsung akan sangat berarti dan mengena atau dapat mencapai sasaran yang diinginkan bersama. Karena keikutsertaan tokoh masyarakat sebagai patron mereka secara langsung pastilah memancing masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan merasakan bagaimana sulit dan beratnya membangun suatu fasilitas yang nantinya akan menjadi milik bersama masyarakat, dengan demikian masyarakat bisa menyadari akan keluh kesahnya.

Memang dengan cara seperti ini pembangunan terkesan agak lamban pelaksanaannya, namun keuntungan yang didapat adalah kelangsungan dari proyek itu sendiri dapat terjamin, hal ini karena masyarakat yang menjadi pelaksana

pembangunan dengan sendirinya juga memiliki tanggung jawab keberhasilan pembangunan desanya.

Berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dengan sumber dana dari APBD dan pelaksanaannya oleh kontraktor pemenang tender dari pemerintah. Segi positifnya hasilnya dapat langsung tampak dan tidak memakan waktu lama serta tersedianya modal yang cukup. Namun segi negatifnya menyangkut kelangsungan dari proyek itu sendiri kurang dapat terjamin, hal ini karena masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan tanpa dilibatkan sama sekali.

Untuk melihat dorongan dan ajakan tokoh masyarakat terhadap masyarakat setempat untuk ikut serta didalam pelaksanaan pembangunan, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27; Keikutsertaan Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Aktif	35	70
2	Kurang Aktif	12	24
3	Tidak Aktif	3	6
Jumlah		50	100

Sumber Data: Hasil Penelitian sampai Nov. 2000

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat ada 35 responden atau sekitar 70%, pada kategori aktif dengan gambaran partisipasi tokoh masyarakat untuk ikutserta atau mengajak masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan secara aktif untuk terlibat secara langsung didalam proses pelaksanaan pembangunan.

Adapun faktor yang menentukan tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah :

- a. Faktor Pendidikan; Dari 35 responden tersebut yang berada pada kategori aktif, berpendapat bahwa dengan keikutsertaan mereka sering mendorong kepada masyarakat dilingkungannya untuk mengikutinya, sedangkan hampir semuanya

pendidikan terendah sampai pada pendidikan menengah keatas. Hal ini yang membuat mereka memiliki pengetahuan dan merespon serta tahu apa maksud dari gambaran yang luas manfaat keterlibatan langsung tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan suatu pembangunan.

- b. Faktor Pendapatan; 35 responden berada pada kategori aktif, bahwa masyarakat tersebut berada pada kategori pendapatan yang tinggi. Dengan pendapatan yang tinggi mereka mempunyai kemampuan dan waktu untuk berpartisipasi secara langsung khususnya kemampuan mereka dalam segi materi, sehingga para responden tidak akan ada rasa beban untuk terlibat secara langsung agar masyarakat lainnyapun untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan baik dari segi materi maupun non-materi.

Dan 12 responden atau sekitar 24% berada pada kategori kurang aktif, bahwa responden menyatakan baik secara kelembagaan ataupun perorangan kurang aktif ikut serta dan mendorong masyarakat untuk aktif dan terlibat secara langsung didalam proses pembangunan tersebut, karena merekapun jarang mengerti apa manfaat keterlibatan mereka. Merekapun kurang memperhatikan tindak lanjut proses pelaksanaan pembangunan selanjutnya, apakah masyarakat merespon positif atautkah hanya sekedar tahu maksud keikutsertaan mereka tersebut.

Kemudian 3 responden atau sekitar 6% berada pada kategori tidak aktif, jika tokoh masyarakat baik secara kelembagaan ataupun perorangan tidak aktif ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan secara langsung.

Berdasarkan kategori tersebut ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi yaitu faktor pendidikan dan faktor pendapatan yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor Pendidikan; 3 responden berada pada kategori tidak aktif, dari gambaran itu responden menunjukkan bahwa tokoh masyarakat tersebut tidak pernah ikut aktif itu semua dikarenakan pendidikan responden yang sangat rendah sulit sekali untuk merespon manfaat keterlibatan langsung tokoh masyarakat agar masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan pula.

- b. Faktor Pendapatan, 3 responden berada pada kategori tidak aktif, karena para responden sulit untuk ikut serta terlibat karena mereka dengan pendapatan yang sangat minim bagi keluarganya tentu mereka akan lebih memprioritaskan kebutuhan keluarganya daripada lingkungannya seperti yang diharapkan oleh lingkungannya.

Jadi berdasarkan kedua faktor tersebut ada gambaran bahwa faktor pendidikan dan faktor pendapatan sangat menentukan tindak lanjut responden dengan keinginan ataupun pancingan keterlibatan tokoh masyarakat agar masyarakat mengikuti untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Evaluasi akan Hasil Pembangunan

Adapun upaya Tokoh Masyarakat Formal (Kepala Desa) dalam mengevaluasi hasil pembangunan tersebut, tokoh masyarakat aparat desa setempat dan pelaksanaannya dilakukan setelah pasca pembangunan usai yang ditempatkan di Balai Desa.

Untuk melihat masalah penyuluhan manfaat akan pembangunan di kelurahan Jember Lor, penulis mengambil sebanyak responden yang ada. Hal ini dengan pertimbangan diharapkan mereka menaruh perhatian atau kemampuan dalam menyerap materi pada masalah manfaat hasil-hasil pembangunan yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat setempat. Sehingga disini yang diukur frekuensi tokoh masyarakat dalam menghadiri penyuluhan atau pemberian informasi akan manfaat hasil pembangunan tersebut oleh tokoh masyarakat. Maka untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28; Evaluasi Hasil Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Aktif	24	48
2	Kurang Aktif	8	16
3	Tidak Aktif	18	36
Jumlah		50	100

Sumber Data; Hasil Penelitian sampai Nov. 2000

Dari tabel tersebut diatas dimana 50 responden terdapat 24 responden atau sekitar 48% berada pada kategori aktif. Disini berarti 24 responden tersebut sering menghadiri penyuluhan dan memberikan gambaran kepada masyarakat serta sering memberikan informasi atau penyuluhan akan manfaat hasil pembangunan selain itu masyarakat mempunyai persepsi akan pentingnya memanfaatkan hasil pembangunan serta responden mampu menyerap, mengerti dan memahami materi penyuluhan sekaligus mampu mempraktekkan hasil dari pemberian informasi tersebut. Kemudian terdapat 8 responden atau sekitar 16% berada pada kategori kurang aktif. Berarti 8 responden jarang menghadiri penyuluhan tersebut dan jarang memberikaan informasi hasil pembangunan tersebut, selain itu karena bagi mereka tidak perlu adanya penyuluhan merekapun sudah faham apa arti pembangunan tersebut, pembangunan hanyalah suatu proses saja meskipun masyarakat mampu menyerap, mengerti dan memahami materi penyuluhan dan juga mempraktekkan namun jarang mengusahakan untuk menikmati akan hasil pembangunan tersebut. Sedangkan 18 responden atau sekitar 36% yang berada pada kategori tidak aktif. Disini berarti responden tersebut tidak pernah menghadiri penyuluhan sehingga kita bisa menggambarkan tokoh masyarakat tidak pernah memberikan informasi akan manfaat hasil pembangunan tersebut meskipun masyarakat menerima informasi materi penyuluhan tapi tidak pernah mempraktekkan dan mengusahakannya.

Mengapa terjadi hal seperti itu. Hal ini semua karena dipengaruhi faktor:

1. Faktor Pendidikan: Bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai, maka mereka akan merespon untuk menghadiri penyuluhan informasi hasil pembangunan tersebut dan mereka mempunyai gambaran pasti masyarakat akan tahu manfaat dari pembangunan tersebut. Atau para responden tahu apa yang harus dia lakukan dengan keberadaan hasil pembangunan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tingkat pendidikannya kurang memadai maka mereka sulit merespon positif ataupun menghadiri acara penyuluhan serta akan mengalami kesulitan dalam menerima informasi tersebut.

2. Faktor Ekonomi: Bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, maka akan sering menghadiri penyuluhan yang diadakan tokoh masyarakat selain itu mereka dapat mengusahakan dan memanfaatkan fasilitas pembangunan tersebut. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi tentunya akan enggan untuk menghadiri penyuluhan tersebut dan mengusahakannya.

Dan yang perlu digaris bawahi, bahwa faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Yang satu mendukung yang lain dan yang lain mendukung yang satu.

4. Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan desa merupakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, hal seperti inilah yang kita inginkan bersama. Untuk rakyat; maksudnya bahwa hasil daripada pembangunan tersebut haruslah dinikmati oleh masyarakat setempat semaksimal mungkin guna mendukung kelangsungan proses pembangunan lingkungan desa. Hal ini tentu harus ada dorongan dari Tokoh Masyarakat setempat guna pemanfaatan akan hasil-hasil pembangunan tersebut beserta pemeliharannya yang benar. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita ketahui bagaimana atau seberapa jauh dan seberapa sering aktifitas ataupun dorongan tokoh masyarakat kelurahan Jember Lor untuk memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan yang dikerjakan bersama-sama tersebut baik berupa aktifitas bersama yang dilakukan perseorangan ataupun kelembagaan, bisa kita lihat pada tabel berikut

Tabel 29; Pemanfaatan Hasil Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Aktif	28	56
2	Kurang Aktif	8	16
3	Tidak Aktif	14	28
Jumlah		50	100

Sumber data; Hasil penelitian sampai Nov 2000

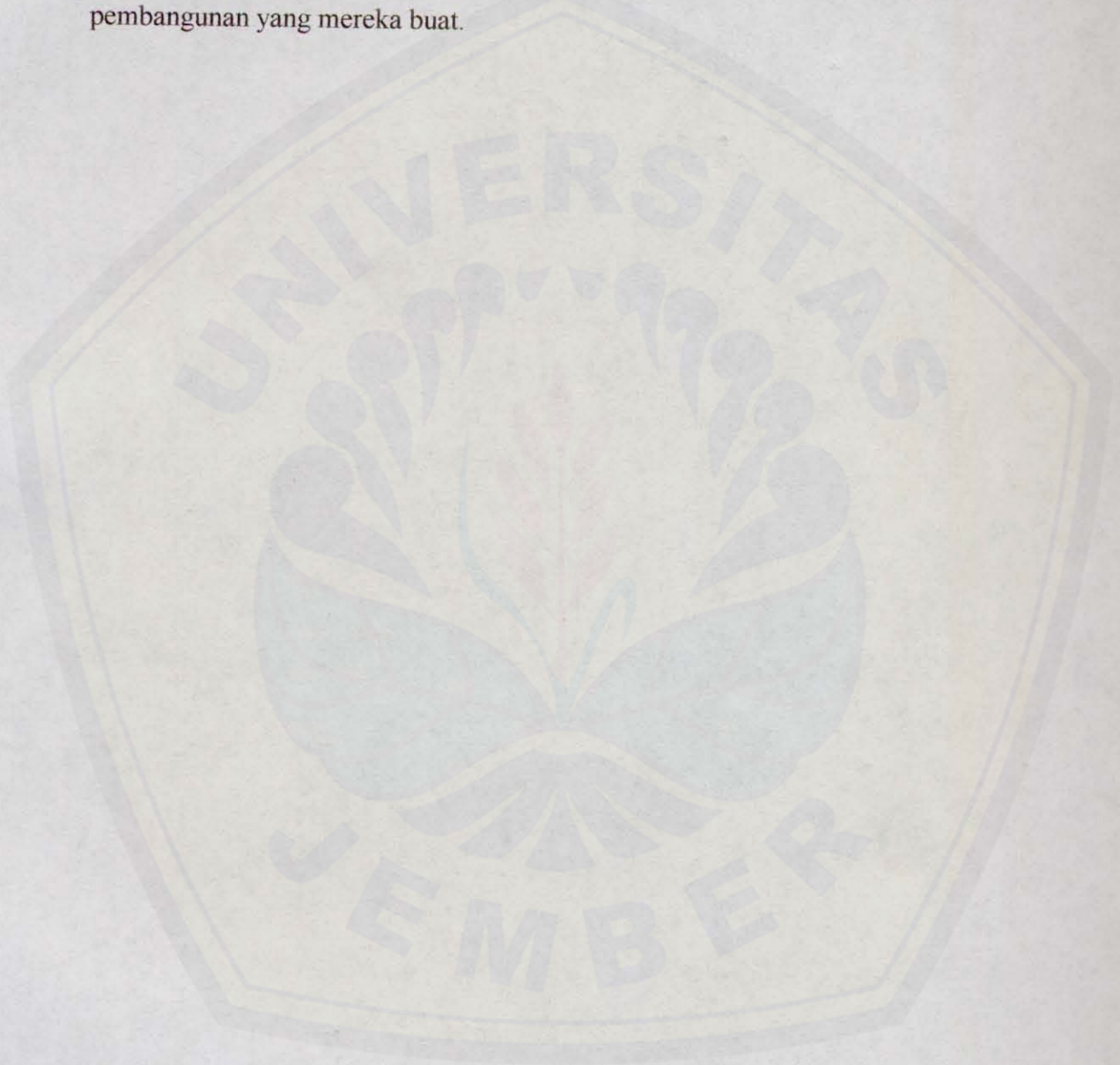
Dari tabel diatas terdapat 28 responden atau sekitar 56% mempunyai anggapan bahwa tokoh masyarakat sering mengajak masyarakat setempat untuk memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Itu semua menunjukkan bahwa 56% responden tersebut mempunyai gambaran bahwa ajakan tersebut sangat penting dan perlu guna terpeliharanya hasil pembangunan tersebut secara maksimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk bisa dinikmati bersama. Dan sebanyak 8 orang atau sekitar 16% responden jarang mengajak ataupun mendorong masyarakat setempat untuk memanfaatkan maupun menikmati fasilitas pembangunan tersebut. Serta sebanyak 14 orang responden atau 28% responden hampir dipastikan tidak pernah mendorong maupun mengajak masyarakat setempat untuk memanfaatkan fasilitas pembangunan tersebut serta meresponnya misal tidak adanya bentuk partisipasi yang dicontohkan oleh tokoh masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan tersebut.

Terjadinya hal tersebut, ada 2 faktor diantaranya bisa kita sebutkan disini ; yaitu :

- a. Faktor Pendidikan; Responden yang mempunyai pendidikan menengah keatas mereka pasti akan mampu merespon akan manfaat memelihara hasil dari pembangunan tersebut. Sehingga responden mempunyai kepekaan apa yang harus mereka lakukan terhadap hasil pembangunan yang mereka anggap hasil jerih bersama. Sedangkan responden yang memiliki pendidikan rendah menerima apa adanya, sulit merespon serta pasif akan hasil pembangunan tersebut.
- b. Faktor Pendapatan; Responden yang berpendapatan menengah keatas pasti bisa menyisihkan pendapatannya guna pemeliharaan pembangunan tersebut dengan timbal baliknya mereka akan memanfaatkan secara maksimal, baik secara ekonomis banyak berguna bagi dirinya pribadi guna mendukung sumber pendapatannya. Sedangkan mereka yang berpendapatan rendah pasti akan tidak tahu menahu akan pemeliharaan hasil pembangunan, sebab mereka tidak ada kemampuan secara materi maupun tenaga yang sudah dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya

(pendapatan) yang serba minim.

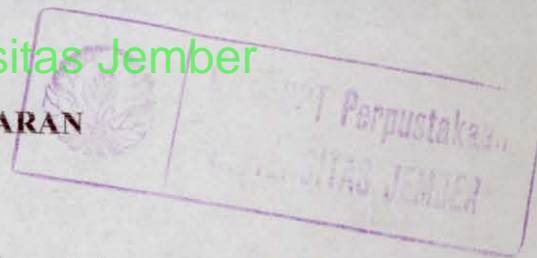
Jadi berdasarkan dua faktor tersebut kita bisa mempunyai gambaran bahwa faktor pendidikan dan faktor pendapatan sangat berperan terhadap kemampuan responden untuk merespon ajakan tokoh masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan yang mereka buat.



Tabel 30; Realisasi Program Pembangunan Th 1999/2000

No	Jenis Proyek	Volume	Subsidi	Swadaya
1	Pos Kamling	2x2x2,5 3 buah	Rp 250.000	Rp 10.000.000
2	Balai RW	6x4x2,5	-	Rp 5.750.000
3	WC Umum	2x2x2,5 2 buah	-	Rp 5.500.000
Jumlah		6 Proyek	Rp 250.000	Rp 21.250.000

Sumber Data: Kantor Kelurahan Jember Lor sampai November 2000



Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab diatas, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penyertaan Tokoh Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Upaya Tokoh Masyarakat dalam mengorganisasikan masyarakat dalam rangka partisipasinya didalam pembangunan dilakukan dengan keaktifannya didalam proses perencanaan pembangunan. Sesuai dengan analisa yang ada bahwa frekuensi prosentase ada 62% keikutsertaan tokoh masyarakat dalam perencanaan pembagunan dan tergolong aktif. Dari analisa tersebut selain faktor pendidikan dan ekonomi atau pendapatan yang mempengaruhi jelas bahwa tingkat partisipasi tokoh masyarakat masih sangat tinggi. Pada proses perencanaan faktor pendidikan berpengaruh terhadap kepekaan merespon tujuan daripada pembangunan tersebut serta kemampuan menyerap informasinya, sedangkan faktor pendapatan berpengaruh terhadap kesempatan tokoh masyarakat untuk menyisihkan sebagian waktunya untuk hadir dalam proses perencanaaan.

5.1.2 Penyertaan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan sulit terlaksanan tanpa adanya partisipasi langsung tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Maka berdasarkan analisis tersebut terlihat angka frekuensi prosentase ada 70% keikutsertaan tokoh dalam pelaksanaan pembangunan dan tergolong aktif. Sehingga dapat disimpulkan keaktifan tokoh masayarakat tergolong tinggi dalam pelaksanaan pembangunan dengan faktor pendidikan dan pendapatan yang mempengaruhi guna menunjang peransertanya didalam pembangunan.

5.1.3 Evaluasi Hasil Pembangunan.

Berdasarkan analisa bahwa Tokoh Masyarakat dalam mengevaluasi akan hasil pembangunan pada tingkat frekuensi prosentasenya ada 48% aktif. Sehingga bisa kami ambil kesimpulan bahwa prosentase tertinggi pada kelompok aktif maka gambaranannya tokoh masyarakat masih ada keikutsertaannya dalam mengevaluasi

Digital Repository Universitas Jember

hasil daripada pembangunan dan mempunyai anggapan masyarakat masih perlu untuk dibimbing sedangkan kelompok yang tergolong tidak aktif mempunyai anggapan bahwa masyarakat tidak perlu mengevaluasi hasil pembangunan karena sebagian tokoh masyarakat beranggapan tidak perlu evaluasi tapi langsung pada pemeliharaan akan hasil pembangunan tersebut.

5.1.4 Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Seperti yang dapat kita lihat bahwa analisa frekuensi prosentase pemanfaatan hasil pembangunan ada 56%, sehingga berdasarkan analisis kita bahwa tetap sebagian besar aktif untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan dengan anggapan perlu hasil pembangunan itu dimanfaatkan biar ada manfaatnya, sedangkan yang tergolong tidak aktif beranggapan masyarakat sudah pandai dan mengetahui apa yang perlu mereka lakukan tanpa adanya aktualisasi yang menyolok pasti akan dimanfaatkan pada waktu-waktu yang akan datang jika dirasa perlu.

5.2 Saran-saran

- A. Tokoh masyarakat yang merupakan contoh panutan dalam usaha peningkatan partisipasi didalam pembangunan hendaknya pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam yang ada dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, ketrampilan dan meningkatkan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat sesuai dengan bidang yang dibutuhkan masyarakat.
- B. Dan hendaknya tokoh masyarakat dalam menyusun program pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan di desa selalu berpedoman pada kebutuhan dan kemauan masyarakat desa yang bersangkutan serta lebih sering untuk memberi contoh dalam keaktifannya dalam tahap-tahap pembangunan yaitu mulai dari perencanaan sampai pada pemanfaatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid S. Susanto, Dr.Phil; 1977; **Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial**; Binacipta; Bandung.
- Baretha, I Nyoman; 1982; **Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa**; PT. Gramedia; Jakarta.
- Comb. Philp. H; 1977; dalam S. T. Vebriarto (ED); **Pendidikan Sosial**; Yayasan Paramita; Yogyakarta.
- Efendi, Sofyan dan Masri Singarimbun; 1980; **Methode Penelitian Survei**; LP3ES; Jakarta. ✓
- Hartoyo; 1986; **Pembangunan Masyarakat Desa**; Karunia UT; Jakarta
- Johnson, Doyle Paul; 1986; **Teori Sosiologi Klasik dan Modern**; Gramedia; Jakarta.
- Kartono, Kartini; 1983; **Methodologi Reserc**; Alumni, Bandung.
- Kartasasmita, Ginanjar; 1997; **Administrasi Pembangunan**; LP3ES; Jakarta
- Koentjaraningrat; 1991; **Methode-methode Penelitian Masyarakat**; PT. Gramedia; Jakarta.
- Mashuri; 1973; **Pembagian Pendidikan**; LP3ES; Jakarta.
- Mubiyarto dan Kartodirjo, Sartono; 1988; **Pembangunan Pedesaan di Indonesia**; Liberty; Jakarta.
- Mulyoharjo, Muchji dan Sukardi; 1987; **Laporan Penelitian Tentang Partisipasi dalam Bantuan Pembangunan Desa**; Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan UGM; Yogyakarta.
- P. Siagian, Sondang; 1989; **Teori Motivasi dan Aplikasi**; PT Aksara; Jakarta.
- Sastro Poetro, R.A. Santoso; 1988; **Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin**; Alumni Bandung.
- Singarimbun; Masri; 1980; **Methode Penelitian Survai**; LP3ES; Jakarta
- Slamet Margono; 1990; **Partisipasi dan Pembangunan**; PT. Gramedia; Jakarta

- Soedjono, Nanang; 1983; **Tingkat Pendidikan Penduduk, Biro Data Kependudukan**; Jakarta.
- Soetarso,; 1982; **Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat; Jilid 1,2 dan 3**; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial; Bandung.
- Soekamto Soerjono; 1982; **Sosiologi Suatu Pengantar**; Rajawali; Jakarta.
- Soelaiman, Holil; 1985; **Partisipasi Masyarakat**; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial; Bandung.
- Sutrisno, Hadi; 1989; **Metode Research I**; Andi Offset; Yogyakarta.
- Surachman, Winarno; 1982; **Dasar-Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah**; CV. Tarsito; Bandung.
- Suyitno, 1983; **Pembangunan Desa**; Liberty; Jakarta
- Syarif, Muhidin; 1986; **Pengantar Kesejahteraan Sosial**; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial; Bandung
- Tampubolon; Usman; 1977; **Pengantar Methodologi Reserch**; Yayasan Penerbit UGM; Yogyakarta
- Tjokroamidjoyo; Bintoro; 1976; **Pengantar Administrasi Pembangunan**; LP3ES; Jakarta
- Depdagri; 1974; **Undang-undang No.6 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah**; Jakarta.
- 1981; **Permendagri No.1 Tahun 1981 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**; Jakarta.
- Suara Merdeka; 1990, **Partisipasi**; Jakarta

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 1600/J 25. 1.2. / PL.5' 2000
Lampiran : 1 (satu) Expl.
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 29 Mei 2000

Kepada Yth : Sdr Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
di -
Jember

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan
ijin penelitian Mahasiswa FISIP Universitas Jember
dengan data :

Nama : **ARIEF WIDYANTO**
Nim : **94-2028**
Jurusan/Prog : **ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Judul : **PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
SOLIDARITAS SOSIAL**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk
mendapatkan data dalam rangka penyelesaian program
S.I

Demikian atas perhatian dan bantuan kami ucapkan
terima kasih.



a.n
Dekan
Pembantu Dekan I

maidi Radi, MA
130 239 058



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No. 3 Telp. (0331) 422723 Fax. (0331) 425540 JEMBER (68118)

Nomor : *SGC* / J25. 3 . 1 / PL.5 / 2000
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan ijin mengadakan Penelitian**

31 MAY 2000

Kepada : **Yth, Sdr. Kakansopol
Pemda Tk. II Kabupaten Jember
di -
JEMBER.**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM / Jurusan : **ARIEF WIDYANTO / 94-2028 / K S.**
~~Desen~~/mahasiswa : **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Jember**
Alamat : **Jl. Nusa Indah II / 36 Jember.**
Judul Penelitian : **Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial.**
Di Daerah : **Kab. Jember.**
Lama Penelitian : **6 (enam) Bulan.**

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada ~~desen~~/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

A.n Ketua,
Sekretaris



Substant
Dr. Sc. Ir. Didik Sulistyato
NIP. 131 792 232

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Universitas Jember
2. ~~Desen~~ /Mahasiswa ybs

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan Kartini No 3 TELP.487732
JEMBER

Jember, 03 Juni 2000

Nomor : 072/110/330.36/2000
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : SURVEY/RESEARCH

K e p a d a
Yth. Sdr. Camat Patrang
di -
P A T R A N G

Dasar Surat Keterangan Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember, Tanggal 31 Mei 2000, Nomor : 566/J25.3.1/PL.5/2000, perihal permohonan ijin Survey / research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan Survey/Research dimaksud diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan oleh :

N a m a : ARIEF WIDYANTO / 94-2028 / KS
Alamat : JL. NUSA INDAH II/36 JEMBER
Pekerjaan : MHS. FAK. SOSPOL UNIV. JEMBER
Keperluan : SURVEY/RESEARCH.
J u d u l : "PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN SOLIDARITAS SOSIAL".
W a k t u : 31 MEI 2000 S/D 31 NOPEMBER 2000.
Peserta : -

Demikian atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. BUPATI JEMBER
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK

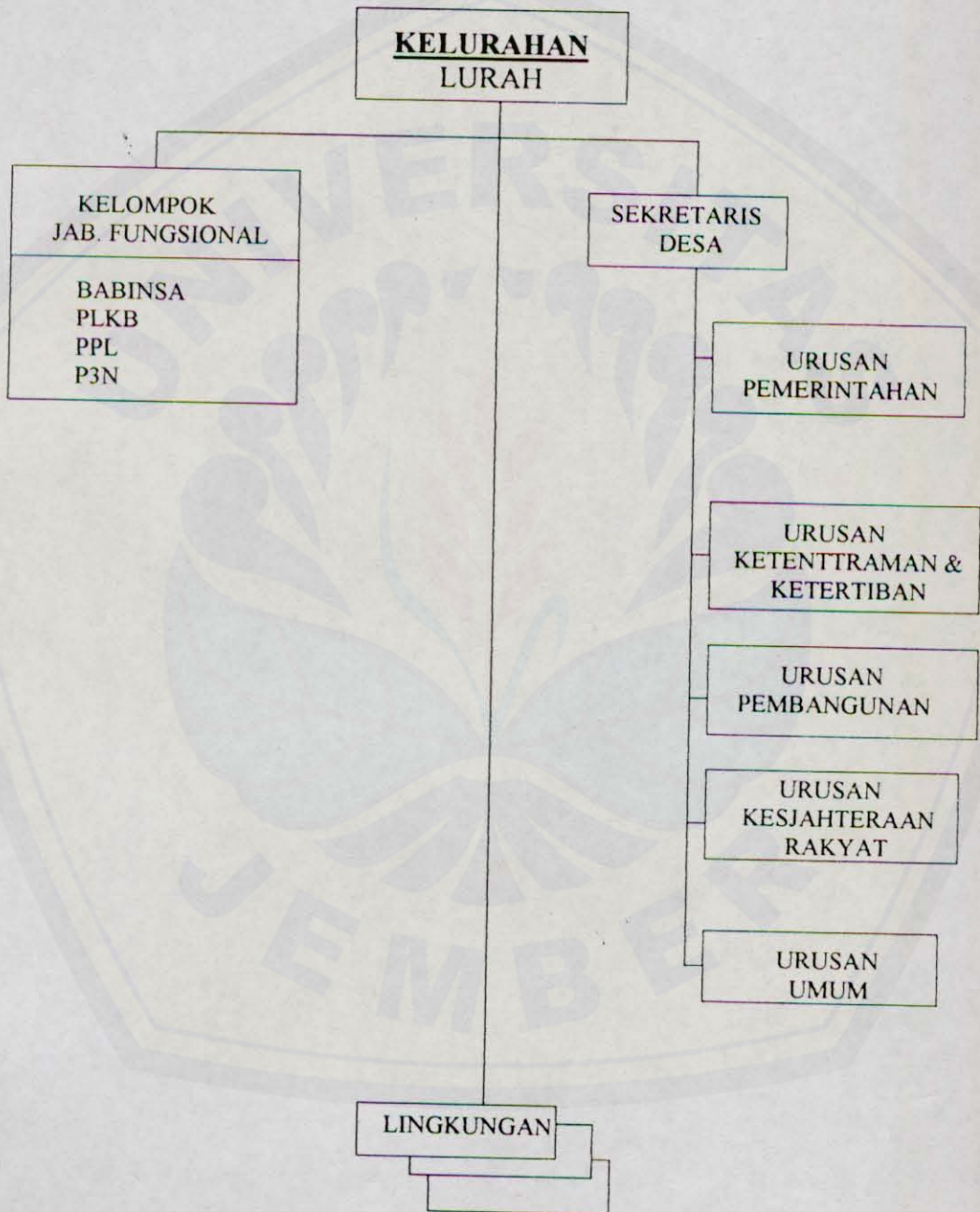


Drs. H. M. GIYONO SUTOMO

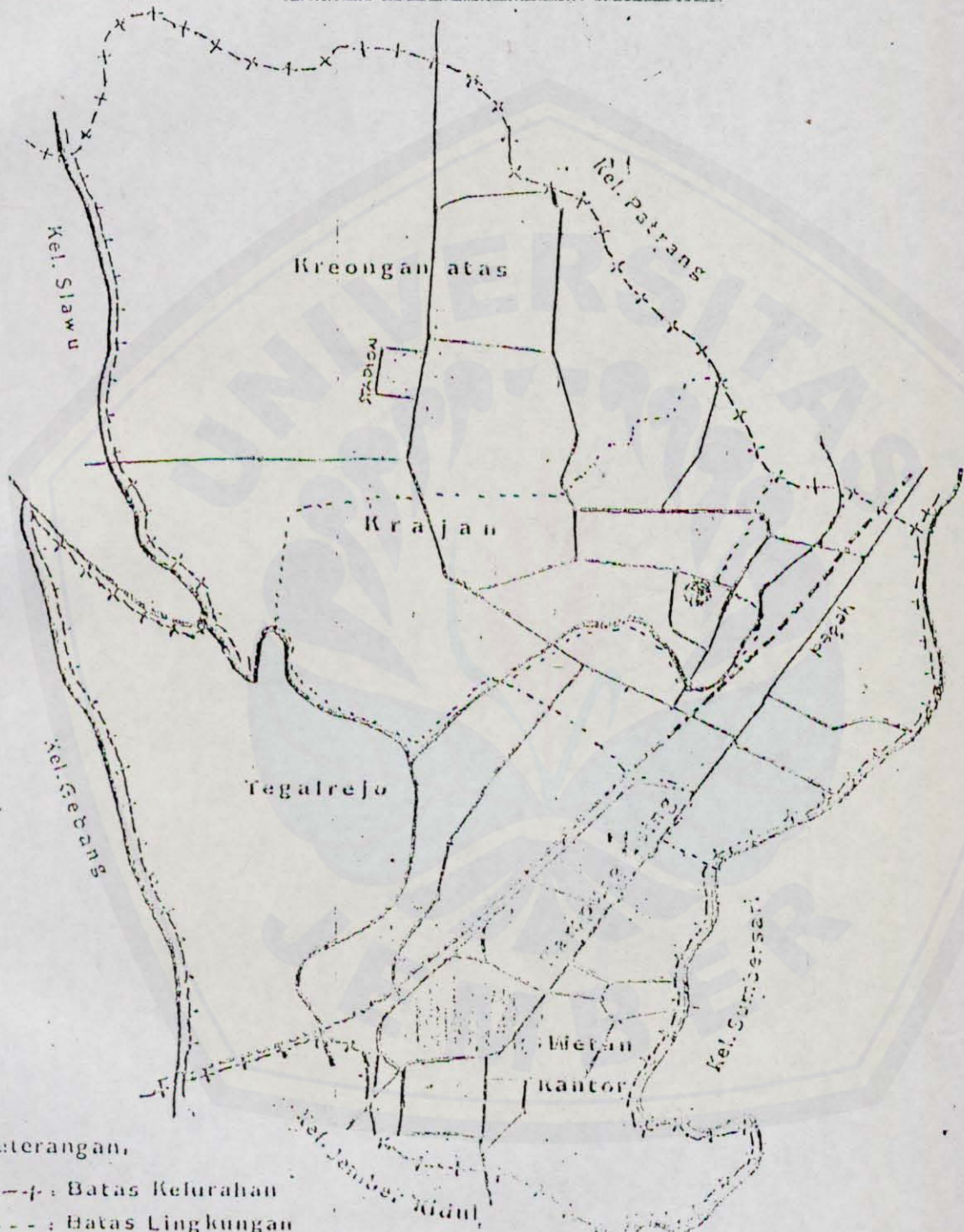
TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Sdr. Kapolres Jember;
2. Sdr. Dan Dim OB24 Jember;
3. Sdr. Rektor Univ. Jember;
4. Sdr. Walikota Jember;

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN JEMBER LOR**



PETA KELURAHAN
JEMBER LOR



Keterangan,

- + -+ : Batas Kelurahan
- : Batas Lingkungan
- : Jalan Aspal
- ~~~~~ : Sungai
- + —+ : Jalan R.A.
- ⊙ : KAWANAN

DAFTAR QUISONER

Identitas Responden:

Alamat : (Jember Lor bag: Utara/Selatan/Timur)*
Usia :
Pendidikan Terakhir:
Status :
Juml. Anggt. Kel :
Pekerjaan :
Pendapatan :

1. Berapa lama anda tinggal di Kelurahan Jember Lor?
 - a. selama 1-5 th
 - b. selama 6-10 th
 - c. selama 11- th
2. Apakah sering kegiatan lingkungan diselenggarakan ?
 - a. sering
 - b. jarang
 - c. tidak pernah
3. Apakah anda mengikuti kegiatan tersebut ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Jika ya; siapa yang menjadi pendorong anda untuk terlibat dalam kegiatan itu ?
 - a. keinginan sendiri
 - b. ikut-ikutan
 - c. dorongan tokoh formal lingkungan
5. Jika kegiatan itu pembangunan lingkungan apakah anda mengikuti pada proses perencanaannya, pelaksanaan, penyuluhan sampai pada pemeliharaan ?
 - a. ya
 - b. tidak
6. Jika ya; siapa yang mendorong anda ?
 - a. keinginan sendiri
 - b. ikut-ikutan
 - c. dorongan tokoh formal/informal lingkungan
7. Apakah penting menurut anda keberadaan tokoh formal dilingkungan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah dalam setiap proses perencanaan sampai pada pemeliharaan anda aktif ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Jika ya; apakah bisa mempengaruhi masyarakat lainnya ?
 - a. Ya
 - b. Biasa-biasa saja
 - c. Tidak

10. Dengan adanya komunikasi antar warga dengan tokoh masyarakat tersebut, bagi anda apa yang bisa diambil manfaatnya ?

Jawaban :

.....
.....

11. Menurut anda apa pengertian tentang partisipasi
- Saling bantu membantu antar sesama warga masyarakat
 - Kerukunan dan Gotong royong dalam memecahkan masalah masyarakat
 - Rasa senasib dan sepenanggungan
12. Alasan anda meningkatkan atau menggalang partisipasi sosial
- Karena warga masyarakat merupakan bagian dari kehidupan anda
 - Karena warga masyarakat akan membantu anda dikemudian hari
 - Karena seagama dengan anda; atau
 - Karena menjalankan tugas dan kewajiban sebagai tokoh panutan
13. Apakah menurut anda manfaat peningkatan solidaritas sosial ?
- Meningkatkan kegotong-royongan
 - Terciptanya kerukunan antar warga masyarakat atau tetangga

Ket:

* : Coret bagian yang tidak perlu

Terima kasih atas partisipasi anda

Alamat Responden

No	Alamat Responden
1.	Jl. Nusa Indah I. No: 12
2.	Jl. Manggis IV. No:42
3.	Jl. Manggis II. No: 8
4.	Jl. Nusa Indah II. No: 33
5.	Jl. Bayangkara 14
6.	Jl. Manggis I. No
7.	Jl. Nusa Indah I. No: 14
8.	Jl. Nusa Indah III. No: 13
9.	Jl. Manggis II. No: 32
10.	Jl. Manggis I. No: 11
11.	Jl. Nusa Indah I. No: 16
12.	Jl. Manggis I. No: 31
13.	Jl. Nusa Indah III. No: 18
14.	Jl. Manggis IV. No:4
15.	Jl. Nusa Indah I. No: 17
16.	Jl. Nusa Indah III. No: 28
17.	Jl. Manggis I. No: 22
18.	Jl. Nusa Indah III. No: 31
19.	Jl. Manggis IV. No:9
20.	Jl. Nusa Indah I. No: 20
21.	Jl. Nusa Indah III. No: 37
22.	Jl. Manggis II. No: 47
23.	Jl. Nusa Indah III. No: 42
24.	Jl. Manggis I. No: 4
25.	Jl. Manggis I. No: 33
26.	Jl. Nusa Indah II. No: 21
27.	Jl. Nusa Indah No :17
28.	Jl. Nusa Indah III. No: 7
29.	Jl. Manggis No: 3
30.	Jl. Nusa Indah No: 15
31.	Jl. Manggis II. No: 17
32.	Jl. Nusa Indah III. No: 48
33.	Jl. Manggis No: 15
34.	Jl. Manggis I. No: 39
35.	Jl. Nusa Indah No: 21
36.	Jl. Manggis No: 25
37.	Jl. Nusa Indah No: 31
38.	Jl. Manggis I. No: 22
39.	Jl. Nusa Indah No: 29
40.	Jl. Manggis IV. No:12
41.	Jl. Nusa Indah II. No: 24
42.	Jl. Manggis I. No: 56
43.	Jl. Manggis II. No: 45
44.	Jl. Nusa Indah III. No: 45
45.	Jl. Nusa Indah I. No: 23
46.	Jl. Manggis IV. No:19
47.	Jl. Nusa Indah III. No: 49
48.	Jl. Manggis II. No: 44
49.	Jl. Nusa Indah II. No: 29
50.	Jl. Nusa Indah No: 52

Daftar hadir dalam perencanaan pembangunan

No	Pos Kamling	Balai RW	WC Umum	Total
1.	Hadir	Hadir	Hadir	3
2.	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	2
3.	Hadir	Hadir	Hadir	3
4.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
5.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
6.	Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	1
7.	Hadir	Hadir	Hadir	3
8.	Hadir	Hadir	Hadir	3
9.	Hadir	Hadir	Hadir	3
10.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
11.	Hadir	Hadir	Hadir	3
12.	Hadir	Hadir	Hadir	3
13.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Hadir	1
14.	Hadir	Hadir	Hadir	3
15.	Hadir	Hadir	Hadir	3
16.	Hadir	Hadir	Hadir	3
17.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
18.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
19.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
20.	Hadir	Hadir	Hadir	3
21.	Hadir	Hadir	Hadir	3
22.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
23.	Hadir	Hadir	Hadir	3
24.	Hadir	Hadir	Hadir	3
25.	Hadir	Hadir	Hadir	3
26.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
27.	Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	1
28.	Hadir	Hadir	Hadir	3
29.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
30.	Hadir	Hadir	Hadir	3
31.	Hadir	Hadir	Hadir	3
32.	Hadir	Hadir	Hadir	3
33.	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	2
34.	Hadir	Hadir	Hadir	3
35.	Hadir	Hadir	Hadir	3
36.	Hadir	Hadir	Hadir	3
37.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
38.	Hadir	Hadir	Hadir	3
39.	Hadir	Hadir	Hadir	3
40.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
41.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
42.	Hadir	Hadir	Hadir	3
43.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
44.	Hadir	Hadir	Hadir	3
45.	Hadir	Hadir	Hadir	3
46.	Hadir	Hadir	Hadir	3
47.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
48.	Hadir	Hadir	Hadir	3
49.	Hadir	Hadir	Hadir	3
50.	Hadir	Hadir	Hadir	3

Daftar hadir dalam pelaksanaan pembangunan

No	Pos Kamling	Balai RW	WC Umum	Total
1.	Hadir	Hadir	Hadir	3
2.	Hadir	Hadir	Hadir	3
3.	Hadir	Hadir	Hadir	3
4.	Hadir	Hadir	Hadir	3
5.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
6.	Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	1
7.	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	2
8.	Hadir	Hadir	Hadir	3
9.	Hadir	Hadir	Hadir	3
10.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
11.	Hadir	Hadir	Hadir	3
12.	Hadir	Hadir	Hadir	3
13.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Hadir	1
14.	Hadir	Hadir	Hadir	3
15.	Hadir	Hadir	Hadir	3
16.	Hadir	Hadir	Hadir	3
17.	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	1
18.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
19.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
20.	Hadir	Hadir	Hadir	3
21.	Hadir	Hadir	Hadir	3
22.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
23.	Hadir	Hadir	Hadir	3
24.	Hadir	Hadir	Hadir	3
25.	Hadir	Hadir	Hadir	3
26.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
27.	Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	1
28.	Hadir	Hadir	Hadir	3
29.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
30.	Hadir	Hadir	Hadir	3
31.	Hadir	Hadir	Hadir	3
32.	Hadir	Hadir	Hadir	3
33.	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	2
34.	Hadir	Hadir	Hadir	3
35.	Hadir	Hadir	Hadir	3
36.	Hadir	Hadir	Hadir	3
37.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
38.	Hadir	Hadir	Hadir	3
39.	Hadir	Hadir	Hadir	3
40.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
41.	Hadir	Hadir	Hadir	3
42.	Hadir	Hadir	Hadir	3
43.	Hadir	Hadir	Hadir	3
44.	Hadir	Hadir	Hadir	3
45.	Hadir	Hadir	Hadir	3
46.	Hadir	Hadir	Hadir	3
47.	Hadir	Hadir	Hadir	3
48.	Hadir	Hadir	Hadir	3
49.	Hadir	Hadir	Hadir	3
50.	Hadir	Hadir	Hadir	3

Daftar hadir dalam evaluasi pembangunan

No	Pos Kamling	Balai RW	WC Umum	Total
1.	Hadir	Hadir	Hadir	3
2.	Hadir	Hadir	Hadir	3
3.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
4.	Hadir	Hadir	Hadir	3
5.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
6.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
7.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Hadir	1
8.	Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	1
9.	Hadir	Hadir	Hadir	3
10.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
11.	Hadir	Hadir	Hadir	3
12.	Hadir	Hadir	Hadir	3
13.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
14.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
15.	Hadir	Hadir	Hadir	3
16.	Hadir	Hadir	Hadir	3
17.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
18.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
19.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
20.	Hadir	Hadir	Hadir	3
21.	Hadir	Hadir	Hadir	3
22.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
23.	Hadir	Hadir	Hadir	3
24.	Hadir	Hadir	Hadir	3
25.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
26.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
27.	Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	1
28.	Hadir	Hadir	Hadir	3
29.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
30.	Hadir	Hadir	Hadir	3
31.	Hadir	Hadir	Hadir	3
32.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
33.	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	2
34.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
35.	Hadir	Hadir	Hadir	3
36.	Hadir	Hadir	Hadir	3
37.	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	2
38.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
39.	Hadir	Hadir	Hadir	3
40.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
41.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
42.	Hadir	Hadir	Hadir	3
43.	Hadir	Hadir	Hadir	3
44.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
45.	Hadir	Hadir	Hadir	3
46.	Hadir	Hadir	Hadir	3
47.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
48.	Hadir	Hadir	Hadir	3
49.	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	-
50.	Hadir	Hadir	Hadir	3

Daftar hadir dalam pemeliharaan pembangunan

No	Pos Kamling	Balai RW	WC Umum	Total
1.	Aktif	Aktif	Aktif	3
2.	Aktif	Aktif	Aktif	3
3.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
4.	Aktif	Aktif	Aktif	3
5.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
6.	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	2
7.	Tidak Aktif	Aktif	Aktif	2
8.	Aktif	Aktif	Aktif	3
9.	Aktif	Aktif	Aktif	3
10.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
11.	Aktif	Aktif	Aktif	3
12.	Aktif	Aktif	Aktif	3
13.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Aktif	1
14.	Aktif	Aktif	Aktif	3
15.	Aktif	Aktif	Aktif	3
16.	Aktif	Aktif	Aktif	3
17.	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	1
18.	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	2
19.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
20.	Aktif	Aktif	Aktif	3
21.	Aktif	Aktif	Aktif	3
22.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
23.	Aktif	Aktif	Aktif	3
24.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
25.	Aktif	Aktif	Aktif	3
26.	Aktif	Aktif	Aktif	3
27.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
28.	Aktif	Aktif	Aktif	3
29.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
30.	Aktif	Aktif	Aktif	3
31.	Aktif	Aktif	Aktif	3
32.	Aktif	Aktif	Aktif	3
33.	Tidak Aktif	Aktif	Aktif	2
34.	Aktif	Aktif	Aktif	3
35.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
36.	Aktif	Aktif	Aktif	3
37.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
38.	Aktif	Aktif	Aktif	3
39.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
40.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
41.	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	2
42.	Aktif	Aktif	Aktif	3
43.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-
44.	Aktif	Aktif	Aktif	3
45.	Aktif	Aktif	Aktif	3
46.	Aktif	Aktif	Aktif	3
47.	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	2
48.	Aktif	Aktif	Aktif	3
49.	Aktif	Aktif	Aktif	3
50.	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	-